



DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN LAMONGAN

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2025-2029

**RANCANGAN RENCANA
STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA
AIR DAN BINA KONTRUKSI
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN
2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 telah dapat diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.

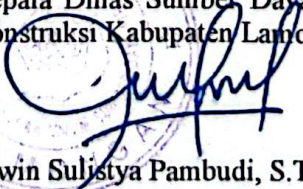
Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Lamongan yakni dari tahun 2025 hingga 2029, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Strategis menyajikan rencana program dan kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan. Dalam Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan juga disajikan target capaian indikator daerah berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mencakup target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lamongan pada akhir periode RPJMD.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Lamongan, September 2025

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Konstruksi Kabupaten Lamongan


Erwin Sulistya Pambudi, S.T., M.M.
NIP. 19770327 200312 1 006

DAFTAR ISI

DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	i
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONTRUKSI KABUPATENLAMONGAN TAHUN 2025-2029.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	11
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	11
A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
1. Tugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi.....	11
2. Fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	11
3. Sumber Daya Perangkat Daerah	21
4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
5. Kelompok sasaran Layanan.....	39
B. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	39
1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	39
BAB III.....	44
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
A. Tujuan dan Sasaran.....	45
1. Strategi dan Arah Kebijakan	49
BAB VI.....	52
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	52
BAB V	68
PENUTUP.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Klasifikasi SDM Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian.....	21
Tabel 2. 2 Klasifikasi ASN Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan.....	22
Tabel 2. 3 Klasifikasi SDM Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	22
Tabel 2. 4 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan.....	23
Tabel 2. 5 Daftar Unit Pelaksana Teknis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan.....	25
Tabel 2. 6 Jenis dan Jumlah Sarana Gedung dan Bangunan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan.....	26
Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan.....	28
Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan	33
Tabel 2. 9 Perumusan Isu Strategi Perangkat Daerah.....	41
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Tahun 2025-2029.....	47
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan	48
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Lamongan.....	49
Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan	50
Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan.....	52
Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Lamongan.....	54
Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Lamongan..	65
Tabel 4. 4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Lamongan	75
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Lamongan	76
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Lamongan	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keselarasan Dokumen Perencanaan	2
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi.....	20
Gambar 3. 1 Cascading Misi III Pada RPJMD Tahun 2021-2026	46
Gambar 3. 2 Cascading RENSTRA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Tahun 2025-2029	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis, terarah dan berkesinambungan apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta tetap memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun Strategi Pembangunan Daerah dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik maka diperlukan adanya perencanaan yang matang, termasuk didalamnya perencanaan terhadap sasaran dan target-target pembangunan harus jelas dan terukur. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan - tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana strategi (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dilingkungan organisasi Perangkat Daerah. Dalam Menyusun Rencana strategi (Renstra) Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

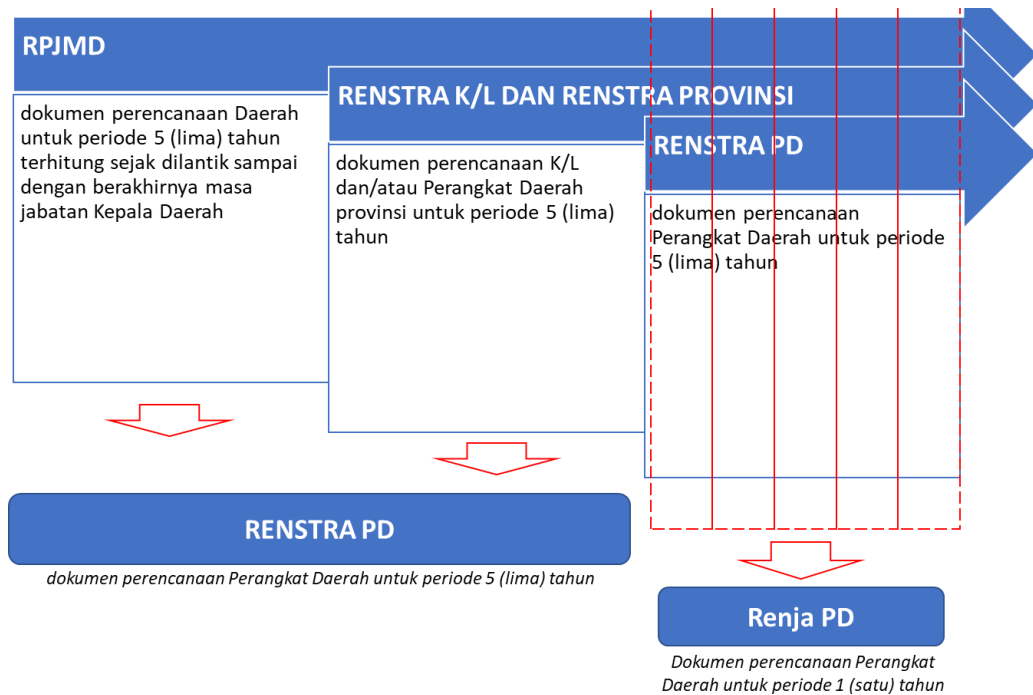
Keterkaitan dokumen Renstra PD dengan RPJMD, Renstra KL dan Renja PD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Renstra PD yang berdimensi 5 tahun merupakan rencana kegiatan PD dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah. Secara detil, Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam RPJMD dengan Target

Tahunan terukur.

2. Renstra Kementerian/Lembaga secara umum memiliki Strategi dan Arah Kebijakan yang selaras dengan Renstra PD. Sehingga dalam lingkup teknis operasional, Dokumen Renstra PD harus berkolerasi kuat dengan Renstra K/L.
3. Pencapaian target Renstra PD yang berdimensi 5 tahun, untuk selanjutnya di distribusikan ke dalam target – target tahunan yang diuraikan secara

Gambar 1. 1 Keselarasan Dokumen Perencanaan



Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan itu sendiri serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (output) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Tahun 2025 -2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025 -

2029. Selanjutnya Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

B. Landasan Hukum

Dasar penyusunan RENSTRA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Tahun 2026 -2030 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan
 26. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status daerah Irigasi
 27. Peraturan Menteri PUPR Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Komisi Irigasi
 28. Peraturan Menteri PUPR Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Irigasi
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 6);
45. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan dimaksudkan untuk menyiapkan instrument perencanaan yang memberikan gambaran kebijakan dan strategi pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Lamongan pada periode Tahun 2025 -2029 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Tahun 2025 -2029 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur untuk lima tahun kedepan. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan Sebagai berikut :

- a. Menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan sebagai dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja ;
- b. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sektor Sumber Daya Air dengan mengacu dokumen RPJMD Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan tahun **2025-2029** dengan menetapkan sasaran maupun target - target pembangunan dengan indikator yang terukur.

D. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Tahun 2021– 2026 disusun dengan sistematika adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembanguan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini memuat penjelasan terkait gambaran pelayanan Perangkat Daerah yang mencakup beberapa hal:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah: Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan data laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme) tentang struktur organisasi Perangkat Daerah.
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah: Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih oprasional.
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah: Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi

oleh pemerintah.

- d. Kelompok sasaran layanan: Menjelaskan pihak-pihak yang menerima pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Perangkat Daerah: Menjelaskan terkait berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perangkat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Isu strategis Perangkat Daerah: Bagian ini menguraikan isu-isu strategis yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam menjalankan pelayanan publik selama lima tahun kedepan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
2. Strategi dan Arah Kebijakan Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan. Kemudian disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 64 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan.

1. Tugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi.

2. Fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi terdiri dari :

- a. Penyusunan perencanaan bidang Sumber Daya Air ;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum bidang Sumber Daya Air;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air;
- d. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) dan standar pelayanan minimal (SPM) urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air;
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Air;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Sumber Daya Air;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sumber Daya Air;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya ;

Selanjutnya, berdasarkan landasan hukum yang sama, Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas;

Tugas : Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, dan melaksanakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan jasa konstruksi.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan jasa konstruksi;
- c. pengendalian pelaksanaan tugas kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan jasa konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan jasa konstruksi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan jasa konstruksi; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat;

Tugas : Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LKjIP, LPPD, dan LKPJ Dinas;
- j. penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyusunan penyiapan bahan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian kerja sama;
- m. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan

kepegawaian;

- n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di sekretariat; dan
- o. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;

Tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan Ikjip, LPPD, LKPJ di lingkup Dinas;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, standar operasional prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup Dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
- h. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- i. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- j. Melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- k. Melaksanakan verifikasi keuangan;
- l. Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan

penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;

- m. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dinas;
- n. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di sub bagian perencanaan, evaluasi, dan keuangan dinas; dan
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup dinas;
- g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;

3) Bidang Bina Konstruksi;

Tugas : Melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina konstruksi tingkat daerah.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina konstruksi;
- b. penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan program di bidang bina konstruksi;
- c. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina konstruksi;
- d. pemantauan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina konstruksi;
- e. perencanaan program dan kegiatan di bidang bina konstruksi;
- f. penyelenggaraan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang bina konstruksi;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan rekomendasi izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten;
- h. penyelenggaraan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- i. undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- j. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- k. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- l. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- m. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan bangunan jasa konstruksi;
- n. penyeliaan bahan penyusunan program dan pembuatan rencana teknis pembangunan serta perbaikan embung desa dan jaringan irigasi desa;

- o. penyelenggaraan inventarisasi, pembangunan, dan rehabilitasi, embung desa, dan jaringan irigasi desa;
- p. penyelenggaraan perizinan dan retribusi tanah solo valley dan/atau tanah pengairan;
- q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perizinan terhadap pemanfaatan aset sumber daya air;
- r. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bina konstruksi; dan
- s. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Operasi dan Pemeliharaan,

Tugas : melaksanakan kebijakan teknis di bidang operasi dan pemeliharaan tingkat Daerah.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pemeliharaan;
- b. Penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan program di bidang operasi dan pemeliharaan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang operasi dan pemeliharaan;
- d. Pemantauan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi dan pemeliharaan;
- e. Perencanaan program dan kegiatan di bidang bina konstruksi;
- f. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang operasi dan pemeliharaan;
- g. Penyeliaan bahan penyusunan program dan pembuatan rencana teknis operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase primer, bangunan pelengkap serta pengelolaan peralatan dan bahan banjir;

- h. Penyelenggaraan survei penelitian dan pengukuran berkaitan dengan rencana program pengembangan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- i. Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasi, dan pemeliharaan sumber daya air;
- k. Penyediaan bahan dan peralatan serta koordinasi dalam rangka penanganan dan pengendalian bencana alam akibat daya rusak air;
- l. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang operasi dan pemeliharaan; dan
- m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Tugas : Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air tingkat daerah.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air;
- b. Penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan sumber daya air;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitas pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- d. Pemantauan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air;
- e. Perencanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya air;

- f. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan fasilitas di bidang pengelolaan sumber day air;
- g. Penyeliaan bahan penyusunan program dan rencana teknis pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, waduk, rawa dan bangunan pelengkapya;
- h. Penyusunan rencana program dan penyelenggaraan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, waduk, rawa dan bangunan pelengkapya;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- j. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya air; dan
- k. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Tugas : melakukan Sebagian tugas Dinas dala rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelayanan teknis operasional di bidang pengelolaan sumber daya air.

Fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan Analisa, dan penyajian data statistic dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan Dinas sesuai lingkup dan wilayah kerjanya;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data teknis bidang pengelolaan sumber daya air dalam rangka perencanaan program;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan teknis operasional Dinas;
- d. Pelaksanaan perumusan perencanaan kebijakan, pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air;
- e. Pengoordinasian teknis dengan instansi dan/atau pihak yang terkait di wilayah kerja UPTD dalam bidang irigasi, penanggulangan bangunan pengairan akibat bencana alam,

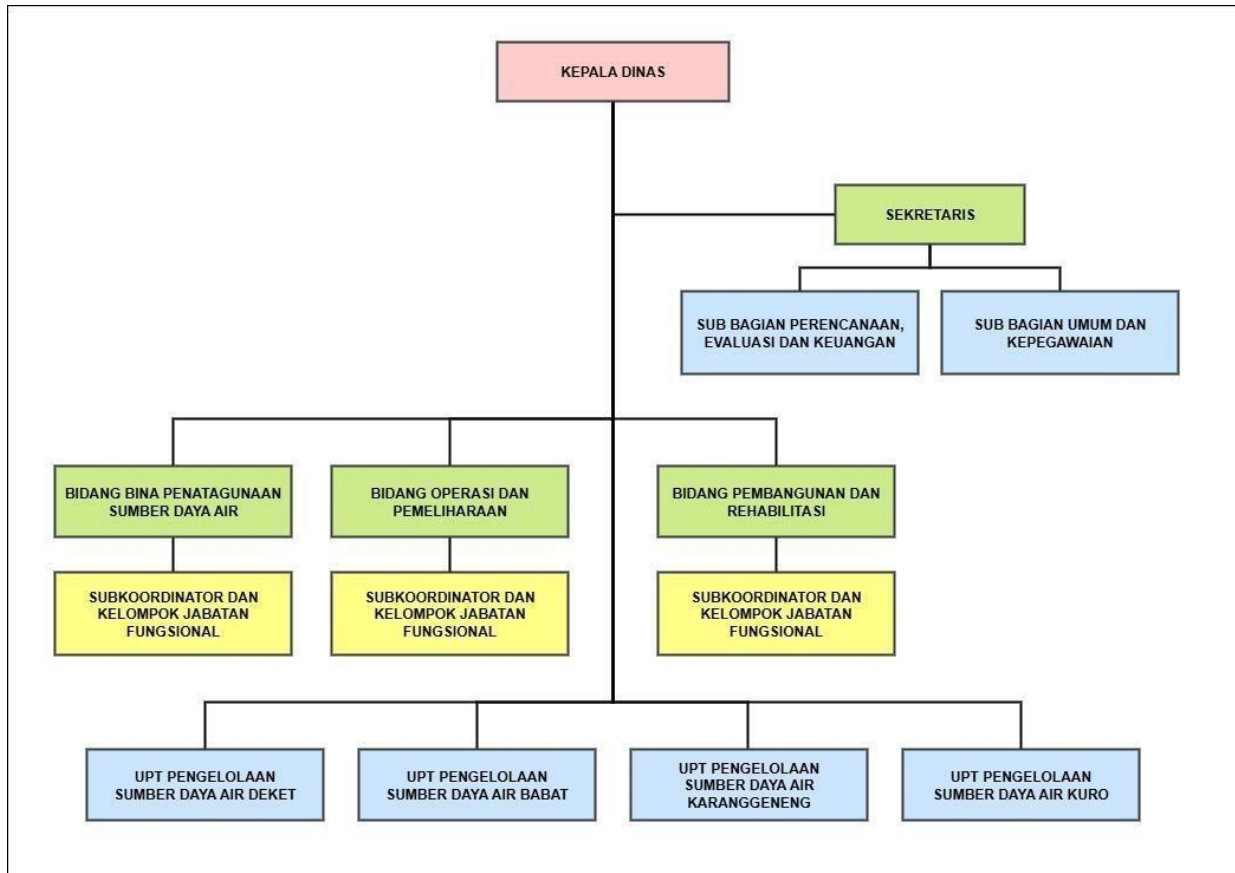
- serta bangunan pengaman pantai;
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan teknis pengelolaan air kepada himpunan Petani Pemakai Air;
 - g. Pelaksanaan laporan/pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di UPTD pengelolaan sumber daya air; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas : melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan unit penempatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan sebagaimana Gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi



3. Sumber Daya Perangkat Daerah

1) Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan hingga akhir bulan Agustus tahun 2021 didukung sumber daya manusia dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Klasifikasi SDM Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	65	3	68
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja	-	-	-
3	Tenaga kontrak	69	4	73
Jumlah		134	7	141

Sumber: Dinas SDABK Lamongan, 2025

Tabel 2. 2 Klasifikasi ASN Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan

NO	Golongan	Jumlah
1	IV	7
2	III	24
3	II	36
4	I	1
Jumlah		68

Sumber: Dinas SDABK Lamongan, 2025

Tabel 2. 3 Klasifikasi SDM Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Pendidikan	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV			Jumlah
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	
SD	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SLTP	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
SLTA	-	-	-	1	7	2	13	14	-	2	-	-	-	-	-	39
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
S1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	7	4	-	-	-	20
S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	6
Jumlah	-	-	-	2	7	4	13	14	5	6	7	4	5	1	-	68

Sumber: Dinas SDABK Lamongan, 2021

2) Aset, Sarana dan Prasarana

Aset berupa Sarana dan prasarana penunjang terhadap kebutuhan dan tugas-tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan secara minimal telah tercukupi, namun untuk pelaksanaan kedepan untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, maka perlu ditunjang dengan adanya prasarana pendukung. Adapun sarana dan prasarana sampai bulan Agustus 2021 terdiri dari :

**Tabel 2. 4 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Konstruksi Kabupaten Lamongan**

No	Nama	Jumlah (Unit)
1	AC (Air Conditioner) Split	16
2	Alat Pemadam /Portable (Alat Pemadam / Portable	3
3	Af Generator Tone Generator (Global Postioning System)	2
4	Amplifier (Handy Talky (HT))	20
5	Audiosystem	5
6	Camera + Attachmen (kamera)	42
7	Kamera Drone ()	2
8	Clawler Excavator (Clawler Excavator)	12
9	Dispencer (Dispenser)	1
10	Display (Monitor/Display)	1
11	Filling Besi/Metal (- Filling Besi/Metal)	15
12	Garpu Kayu (Lain-lain)	3
13	Gergaji (Lain-lain)	2
14	Kipas Angin ()	24
15	Komparator	2
16	Kursi Kerja Eselon IV (Kursi Kerja Pejabat Eselon IV)	1
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon III (Kursi Kerja Pejabat Eselon III)	2
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	2
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Pejabat Eselon IV)	2
20	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	3
21	Kursi Rapat (Kursi Rapat)	119
22	Kursi Staff ()	199
23	Alat GPS	2
24	Facsimile	1
25	LED TV	2

No	Nama	Jumlah (Unit)
26	Mesin Potong rumput	8
27	Meteran Laser	4
28	Pompa Air	25
29	Prahu Kayu	1
30	sonsistem rakitan	1
31	Lap Top (Lap Top)	2
32	LCD Proyektor ()	5
33	Lemari Arsip ()	6
34	Lemari Kayu (Meja Tulis)	17
35	Papan Larangan (Papan larangan)	41
36	Magnetic tape Unit (Hard Disk)	13
37	Meja kayu/Rotan (Kursi Lipat)	6
38	Meja Kerja Pegawai Non struktural (Meja Kerja Pegawai Non Struktural)	3
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II (Meja Kerja Pejabat Eselon II)	1
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III (Meja Kerja Pejabat Eselon III)	4
41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Pejabat Eselon IV)	3
42	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Pejabat Eselon IV)	12
43	Meja Kerja Staf (Kursi Kerja Staf)	5
44	Meja Pelayanan ()	1
45	Meja Rapat (meja rapat)	33
46	Mesin Absensi (Mesin Absensi)	1
47	Mesin Gergaji ()	5
48	Mesin Ketik Manual	5
49	Mesin Potong Rumput ()	19
50	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) (Mobil)	2
51	Monitor (Monitor)	2
52	Motor Boat (Motor Boat)	3

No	Nama	Jumlah (Unit)
53	Motor Roda Tiga (New Karya 150 RL)	1
54	Note Book (Note Book)	55
55	P.C. Unit (P.C Unit)	40
56	Papan Nama Instansi (Papan Nama Instansi)	2
57	Papan Tulis (Papan Tulis)	1
58	Perkakas kantor ()	58
59	Pick Up (Pick Up)	1
60	Printer (Printer)	69
61	Proyektor + Attachment (Proyektor+Attachment)	2
62	Rak Besi/Metal (Krisbow)	4
63	Router (Router)	3
64	Scanner (Scanner)	3
65	Sepeda Motor ()	52
66	Station Wagon (Station Wagon)	5
67	Truck +Attachment (Truck + Attachment)	3
68	Unit Transcarver/Transmitter UHF (Pesawat Telephone)	4
69	Wheel Excavator (Wheel Excavator)	8
70	Lain-Lain	15

Sumber: Kartu Inventaris Dinas PUSDA, 2021

Tabel 2. 5 Daftar Unit Pelaksana Teknis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI		KET.
			BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	5	6
1	UPT Deket	1	1	-	
2	UPT Karanggeneng	1	1	-	
3	UPT Kuro	1	1	-	

4	UPT Babat	1	1	-	
---	-----------	---	---	---	--

Tabel 2. 6 Jenis dan Jumlah Sarana Gedung dan Bangunan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI		KET.
			BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	24	24	-	
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	3	3	-	
3	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	2	-	2	
4	Rumah Negara Golongan III Type D Permanen	52	35	17	
5	Gedung Garasi	1	1	-	

4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkaitan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pelayanan dan melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi.

Tingkat capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) diketahui dengan

mengevaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah (PD) periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun lalu untuk menunjukkan tingkat capaian/realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai selama pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah (PD) periode sebelumnya (2021-2024), terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan

NO.	INDIKATOR	TARGET SDGS	TARGET IKK/IKU	TARGET INDIKATOR SPM /NSPK /LPPD	TARGET				REALISASI				CAPAIAN			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
I.	Tujuan															
1	Indeks Infrastruktur Irigasi	-	✓	-	N/A	75,30%	75,62%	75,86%	N/A	75,31%	81,91%	82,26%	N/A	100,01%	108,32%	108,44%
II.	Sasaran															
1	Rasio luasan sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam	-	-	-	N/A	82,00%	83,00%	84,00%	N/A	82,01%	83,01%	84,01%	N/A	100,01%	100,01%	100,01%
2	Nilai SAKIP Dinas PU. Sumber Daya Air	-	-	-	N/A	87,01	87,26	87,51	N/A	89,29	87,56	89,26	N/A	102,62%	100,34%	102,00%
III.	Program	-	-	-												
1	IKM Internal Dinas PU. Sumber Daya Air	-	-	-	N/A	84	85	86	N/A	84,70	85,15	86,12	N/A	100,83%	100,18%	100,14%
1	Prosentase Ketersediaan Air	-	-	-	N/A	80,50%	81,00%	81,50%	N/A	80,60%	81,02%	81,53%	N/A	100,12%	100,02%	100,04%
2	Prosentase Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	-	-	-	N/A	69,55%	71,05%	72,55%	N/A	71,22%	72,56%	74,08%	N/A	102,40%	102,13%	102,11%
3	Prosentase Luas Area Bebas Genangan Banjir	-	-	-	N/A	28,56%	29,56%	30,56%	N/A	28,60%	29,57%	30,50%	N/A	100,14%	100,03%	99,80%
IV	Kegiatan	-	-	-												
1	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	-	-	-	N/A	15	15	15	N/A	15	15	15	N/A	100%	100%	100%
						Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	Dokumen				
2	Prosentase Kepuasan Aparatur Internal Perangkat Daerah	-	-	-	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%
3	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian dengan baik	-	-	-	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A

NO.	INDIKATOR	TARGET SDGS	TARGET IKK/IKU	TARGET INDIKATOR SPM /NSPK /LPPD	TARGET				REALISASI				CAPAIAN			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
4	Prosentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan baik	-	-	-	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%
5	Prosentase Sarana dan Prasarana Perkantoran kondisi baik	-	-	-	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%
6	Prosentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	-	-	-	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%
7	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-	-	-	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%
8	- Volume Ketersediaan Air Baku	-	✓	-	N/A	94.242.633 m3	94.827.991 m3	95.413.349 m3	N/A	94.363.311 m3	94.854.422 m3	95.448.470 m3	N/A	100,13%	100,03%	100,04%
	- Luas Area Bebas Genangan Banjir	-	✓	-	N/A	1.064 km	1.086 km	1.109 km	N/A	1.066 km	1.086 km	1.109 km	N/A	100,19%	100,00%	100,00%
	- Presentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Pemukiman Rawan Banjir Kewenangan Kabupaten Kota	-	✓	-	N/A	-	-	-	19,87	31,93	28,10	95,65	-	-	-	-
9	- Panjang Jaringan Irigasi Berkondisi Baik	-	-	-	N/A	2.599 Hektar	2.690 Hektar	2.781 Hektar	N/A	2.603 Hektar	2.691 Hektar	2.783 Hektar	N/A	100,15%	100,04%	100,07%
	- Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	-	✓	-	88,40	86,03	87,35	84,20	84,20	86,03	87,35	84,20	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas SDABK (Data diolah)

Indikator Tujuan : Indeks Infrastruktur Irigasi

Indeks Infrastruktur Irigasi menunjukkan tren positif selama periode 2021 hingga 2024. Capaian realisasi meningkat dari 75,86% pada tahun 2023 menjadi 81,90% pada tahun 2024. Meskipun target tahunan juga mengalami kenaikan, capaian Dinas PU. Sumber Daya Air secara konsisten melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian tertinggi sebesar 108,44% diakhir tahun 2024. Hal ini menunjukkan perbaikan yang berkesinambungan dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan tingkat koordinasi antar stakeholder di antaranya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan Dinas PU. Provinsi Jawa Timur dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur irigasi maupun infrastruktur pengendali banjir.

Indikator Sasaran

- Capaian Kinerja

Kinerja Dinas PU. Sumber Daya Air dalam memenuhi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah, dan indikator program perangkat daerah menunjukkan konsistensi dan perbaikan dari tahun ke tahun meskipun realisasi capaiannya hanya 0,01%, karena luas sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam terutama MK II terdapat faktor eksternal/ faktor alam yang sangat berpengaruh.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PU. Sumber Daya Air diantaranya prosentase ketersediaan air, prosentase jaringan irigasi berkondisi baik dan prosentase luas area bebas genangan banjir menunjukkan tren positif, walaupun terdapat sedikit penurunan pada capaian terhadap target di ketiga indikator tersebut dapat dilihat pada gambar 2. Ini menandakan bahwa meskipun target meningkat, Dinas PU. Sumber Daya Air mampu mempertahankan kinerja pada tingkat yang tinggi dan stabil.

- Nilai SAKIP

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengalami peningkatan dari 87,29 (2022) menjadi 89,26 (2024), dengan capaian di atas 100% setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan tata kelola organisasi yang semakin baik, transparan, dan berorientasi hasil pada Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan.

Indikator Program

- IKM Internal Dinas PU. Sumber Daya Air

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal menunjukkan peningkatan dari 84,70 (2022) menjadi 86,12 (2024). Meskipun target tahunan juga mengalami kenaikan, capaian

Dinas PU. Sumber Daya Air secara konsisten melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian tertinggi sebesar 100,83% pada tahun 2022 dan tetap di atas 100% hingga 2024, hal ini mencerminkan tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan internal dan proses kerja yang mendukung kinerja organisasi. Meskipun terdapat sedikit penurunan persentase capaian terhadap target, hal ini terjadi seiring dengan peningkatan standar target tahunan yang lebih ambisius.

Secara umum, capaian kinerja PUSDA pada periode 2021-2024 menunjukkan kinerja positif. Beberapa aspek yang dapat dianalisis dari capaian tersebut diantaranya adalah:

- *Faktor Keberhasilan*
 - Dalam menyusun perencanaan diprioritaskan lokasi-lokasi yang tingkat urgencynya lebih tinggi;
 - Peningkatan saluran irigasi berkondisi baik dan berjalannya kelembagaan IP3A, GP3A sehingga kebutuhan air pada MT II terlayani dengan baik;
 - Dalam menangani permasalahan banjir di daerah rawan banjir Dinas PUSDA berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi sehingga menunjukkan hasil yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat yang terdampak;
 - Optimalisasi kegiatan operasi dan pemeliharaan untuk memperlancar saluran pembuang/kanal banjir
- *Identifikasi Masalah/Kesenjangan*
 - Terbenturnya atas aset kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi maka pembangunan peningkatan kapasitas layanan irigasi menjadi terhambat;
 - Berkurangnya daya tampung air baku pada waduk/rawa/embung desa serta akibat sedimentasi
 - Kurang optimalnya konstruksi saluran irigasi yang memadai sehingga air tidak teralirkan ke lahan pertanian
 - Perubahan fungsi lahan penampung air serta saluran irigasi menjadi bangunan liar.
 - Peyempitan kali/sungai/saluran pembuang yang berfungsi sebagai saluran pengendalian banjir.
- *Akar Permasalahan yang Diidentifikasi*
 - Belum adanya regulasi untuk mempercepat penanganan atau pengambilan keputusan saat melakukan pembangunan pada aset kewenangan Pusat maupun kewenangan Provinsi;

- Belum terkendalinya pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Air;
- Perlu peningkatan kualitas data dan koordinasi lintas sektor

Meskipun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, secara umum capaian kinerja pelayanan Dinas PUSDA menunjukkan kinerja yang positif selama periode tersebut. Kinerja positif Dinas PUSDA Kabupaten Lamongan tidak hanya ditunjukkan melalui capaian kinerja pelayanan, akan tetapi juga ditunjukkan dengan capaian kinerja keuangan yang selanjutnya dijadikan pertimbangan penetapan pagu indikatif dalam penyusunan Renstra Dinas PUSDA Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029. Berikut disajikan Tabel 2.7 yang menggambarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas PUSDA Kabupaten Lamongan tahun 2020- 2024:

Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	10.279.45 1.818,00	10.714.52 1.792,00	10.472.023.80 0,00	10.369.415. 438,00	N/A	9.255.035.076 ,00	9.804.975.4 81,00	9.125.932. 299,00	9.431.346. 322,00	N/A	111,07	109,28	114,75	109,95	2%	1%
Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	60.000.00 0,00	77.500.00 0,00	165.000.000,0 0	100.000.00 0,00	N/A	56.291.900,00	77.455.000, 00	160.072.60 0,00	91.408.500 ,00	N/A	106,59	100,06	103,08	109,40	5%	25%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	30.000.00 0,00	37.500.00 0,00	25.000.000,00	25.000.000, 00	N/A	29.380.300,00	37.455.000, 00	24.590.000, 00	23.888.400 ,00	N/A	102,11	100,12	101,67	104,65	13%	-2%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	15.000.00 0,00	15.000.00 0,00	45.000.000,00	60.000.000, 00	N/A	13.516.900,00	15.000.000, 00	41.183.600, 00	54.635.300 ,00	N/A	110,97	100,00	109,27	109,82	8%	55%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	15.000.00 0,00	25.000.00 0,00	95.000.000,00	15.000.000, 00	N/A	13.394.700,00	25.000.000, 00	94.299.000, 00	12.884.800 ,00	N/A	111,98	100,00	100,74	116,42	12%	69%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	6.813.632. 870,00	7.131.240. 844,00	6.138.522.000 ,00	6.441.068.9 48,00	N/A	6.560.843.696 ,00	6.728.949.7 29,00	5.850.674. 243,00	6.131.436. 476,00	N/A	103,85	105,98	104,92	105,05	4%	-1%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	6.768.632. 870,00	7.086.240. 844,00	6.106.122.000 ,00	6.361.268.9 48,00	N/A	6.515.843.696 ,00	6.683.949.7 29,00	5.818.274.3 93,00	6.088.816. 474,00	N/A	103,88	106,02	104,95	104,47	3%	-1%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	15.000.00 0,00	15.000.00 0,00	12.400.000,00	16.600.000, 00	N/A	15.000.000,00	15.000.000, 00	12.399.850, 00	14.128.400 ,00	N/A	100,00	100,00	100,00	117,49	8%	-1%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	15.000.00 0,00	15.000.00 0,00	10.000.000,00	16.600.000, 00	N/A	15.000.000,00	15.000.000, 00	10.000.000, 00	14.504.840 ,00	N/A	100,00	100,00	100,00	114,44	17%	3%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	15.000.00 0,00	15.000.00 0,00	10.000.000,00	16.600.000, 00	N/A	15.000.000,00	15.000.000, 00	10.000.000, 00	13.986.762 ,00	N/A	100,00	100,00	100,00	118,68	17%	2%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	42.300.000,00	50.000.000,00	75.645.000,00	0	N/A	42.300.000,00	49.922.400,00	53.107.500,00	0	N/A	100,00	100,16	142,44	0	-	-19%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	N/A	42.300.000,00	27.500.000,00	52.325.000,00	0	N/A	42.300.000,00	27.422.400,00	52.287.500,00	0	N/A	100,00	100,28	100,07	0	-	-11%
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	N/A	0,00	22.500.000,00	23.320.000,00	0	N/A	0,00	22.500.000,00	820.000,00	0	N/A	0,00	100,00	2.843,90	0	-	-49%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	112.500.000,00	140.750.000,00	178.135.200,00	285.855.000,00	N/A	112.278.820,00	140.454.470,00	168.051.650,00	271.260.025,00	N/A	100,20	100,21	106,00	105,38	28%	27%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	N/A	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	46.454.600,00	N/A	10.000.000,00	11.999.900,00	11.999.900,00	46.021.725,00	N/A	100,00	100,00	100,00	100,94	82%	76%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	20.000.000,00	20.000.000,00	12.100.000,00	17.020.000,00	N/A	19.998.000,00	19.998.000,00	12.099.400,00	17.020.000,00	N/A	100,01	100,01	100,00	100,00	10%	0%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	25.000.000,00	37.500.000,00	50.050.200,00	82.232.000,00	N/A	25.000.000,00	37.411.100,00	50.050.200,00	79.594.200,00	N/A	100,00	100,24	100,00	103,31	41%	36%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	25.000.000,00	33.750.000,00	30.000.000,00	46.765.000,00	N/A	24.999.820,00	33.749.470,00	29.999.930,00	40.658.700,00	N/A	100,00	100,00	100,00	115,02	31%	15%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	12.500.000,00	12.500.000,00	13.985.000,00	13.380.000,00	N/A	12.440.000,00	12.500.000,00	13.980.000,00	13.190.000,00	N/A	100,48	100,00	100,04	101,44	-1%	2%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	20.000.000,00	25.000.000,00	60.000.000,00	80.000.000,00	N/A	19.841.000,00	24.796.000,00	49.922.220,00	74.775.400,00	N/A	100,80	100,82	120,19	106,99	21%	44%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	211.955.000,00	N/A	24.985.500,00	24.979.200,00	19.992.400,00	203.232.000,00	N/A	100,06	100,08	100,04	104,29	240%	224%
Pengadaan Sarana dan Prasarana	N/A	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	211.955.000,00	N/A	24.985.500,00	24.979.200,00	19.992.400,00	203.232.000,00	N/A	100,06	100,08	100,04	104,29	240%	224%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	3.158.318.948,00	3.240.030.948,00	3.537.669.800,00	2.939.775.290,00	N/A	2.390.652.760,00	2.633.837.582,00	2.517.578.806,00	2.355.543.771,00	N/A	132,11	123,02	140,52	124,80	-3%	0%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	N/A	3.999.800,00	4.000.000,00	3.990.000,00	4.000.000,00	N/A	100,01	100,00	100,25	100,00	0%	0%
Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	N/A	1.423.587.401,00	1.423.587.401,00	1.473.587.000,00	836.483.090,00	N/A	881.805.160,00	995.188.662,00	835.967.266,00	681.518.067,00	N/A	161,44	143,05	176,27	122,74	11%	-5%
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	20.500.000,00	N/A	19.999.600,00	19.998.600,00	14.999.980,00	20.500.000,00	N/A	100,00	100,01	100,00	100,00	9%	3%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	1.643.031.547,00	1.643.031.547,00	1.688.031.000,00	1.688.031.000,00	N/A	1.484.848.200,00	1.614.650.320,00	1.662.621.560,00	1.649.525.704,00	N/A	110,65	101,76	101,53	102,33	0%	3%
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	67.700.000,00	149.412.000,00	357.051.800,00	390.761.200,00	N/A	67.682.400,00	149.377.100,00	356.455.100,00	378.465.550,00	N/A	100,03	100,02	100,17	103,25	63%	66%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	N/A	47.700.000,00	99.412.000,00	107.051.800,00	130.761.200,00	N/A	47.682.400,00	99.377.100,00	107.048.600,00	129.426.100,00	N/A	100,04	100,04	100,00	101,03	60%	34%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	20.000.000,00	50.000.000,00	250.000.000,00	260.000.000,00	N/A	20.000.000,00	50.000.000,00	249.406.500,00	249.039.450,00	N/A	100,00	100,00	100,24	104,40	76%	137%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	N/A	82.948.807.100,00	37.970.957.895,00	49.826.932.000,00	54.821.739.050,00	N/A	75.955.364.323,00	37.731.615.882,00	44.126.273.952,00	43.180.594.806,00	N/A	109,21	100,63	112,92	126,96	25%	-9%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Lamongan	N/A	21.490.252.100,00	25.474.000.000,00	37.560.613.000,00	34.658.593.100,00	N/A	20.855.981.600,00	25.601.288.196,00	32.325.625.289,00	27.479.569.351,00	N/A	103,04	99,50	116,19	126,12	7%	9%	
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	N/A	2.362.000.000,00	4.265.500.000,00	5.181.800.000,00	6.678.535.050,00	N/A	2.336.689.000,00	4.218.239.000,00	3.927.018.900,00	5.845.284.094,00	N/A	101,08	101,12	131,95	114,26	48%	31%	
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	N/A	430.238.000,00	0	4.687.960.800,00	5.032.971.000,00	N/A	429.026.400,00	0	3.802.568.500,00	3.620.200.192,00	N/A	100,28	0	123,28	139,02	-	48%	-26%
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	N/A	6.970.472.100,00	8.093.500.000,00	7.270.852.200,00	7.634.257.400,00	N/A	6.961.961.700,00	8.024.213.100,00	7.257.579.950,00	6.350.572.150,00	N/A	100,12	100,86	100,18	120,21	9%	-2%	
Rehabilitasi Unit Air Baku	N/A	525.498.000,00	200.000.000,00	700.000.000,00	2.130.526.000,00	N/A	524.398.000,00	198.489.000,00	680.643.600,00	2.010.960.300,00	N/A	100,21	100,76	102,84	105,95	20%	94%	
Rehabilitasi Kanal Banjir	N/A	200.000.000,00	0	7.120.000.000,00	2.568.563.050,00	N/A	199.516.000,00	0	5.140.238.050,00	2.513.861.815,00	N/A	100,24	0,00	138,51	102,18	-	66%	-38%
Normalisasi/Restorasi Sungai	N/A	6.987.694.000,00	4.560.000.000,00	7.405.000.000,00	6.094.523.250,00	N/A	6.972.725.500,00	4.514.681.800,00	6.561.480.650,00	4.424.257.750,00	N/A	100,21	101,00	0	137,75	-4%	0%	
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	N/A	2.890.550.000,00	3.890.000.000,00	4.100.000.000,00	3.683.153.350,00	N/A	2.336.689.000,00	4.218.239.000,00	3.927.018.900,00	1.937.966.530,00	N/A	123,70	92,22	104,40	190,05	15%	6%	
Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	N/A	973.800.000,00	4.425.000.000,00	545.500.000,00	546.155.000,00	N/A	945.236.000,00	4.387.426.296,00	544.609.440,00	535.502.520,00	N/A	103,02	100,86	100,16	101,99	177%	69%	
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	N/A	150.000.000,00	0	424.500.000,00	239.909.000,00	N/A	149.740.000,00	0,00	359.639.500,00	190.964.000,00	N/A	100,17		118,03	125,63	-	61%	-37%
Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	0	20.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	N/A	0	20.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	N/A	0	100,00	100,00	100,00	-8%	60%	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	0	20.000.000,00	50.000.000,00	0	N/A	0	20.000.000,00	49.827.799,00	0	N/A	0	100,00	100,35	0	-	25%	12%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	61.458.555.000,00	12.496.957.895,00	12.266.319.000,00	20.163.145.950,00	N/A	55.099.382.723,00	12.130.327.686,00	11.800.648.663,00	15.701.025.455,00	N/A	111,54	103,02	0,00	128,42	-	24%	-12%
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	N/A	2.445.000.000,00	2.565.000.000,00	1.528.200.000,00	6.063.385.950,00	N/A	2.431.675.700,00	2.529.714.900,00	1.512.681.000,00	4.715.903.400,00	N/A	100,55	101,39	101,03	128,57	77%	44%	
Pembangunan Bendung Irigasi	N/A	1.140.873.900,00	225.000.000,00	665.000.000,00	1.477.504.000,00	N/A	1.139.773.900,00	221.881.000,00	646.252.200,00	1.054.630.440,00	N/A	100,10	101,41	102,90	140,10	-	10%	43%
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	N/A	7.757.633.100,00	2.000.000.000,00	6.747.187.000,00	8.727.482.000,00	N/A	7.755.006.000,00	1.982.860.000,00	6.724.594.893,00	6.261.179.095,00	N/A	100,03	100,86	100,34	139,39	-	30%	39%
Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	N/A	48.000.000,00	6.122.868.895,00	0,00	0,00	N/A	41.850.864.123,00	6.010.950.386,00	0,00	0,00	N/A	114,69	101,86	0,00	0,00	-	44%	-46%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	N/A	748.771.000,00	1.168.023.000,00	1.966.932.000,00	2.646.728.000,00	N/A	556.186.000,00	971.420.400,00	1.591.418.600,00	2.581.164.420,00	N/A	134,63	120,24	123,60	102,54	37%	50%	
Rehabilitasi Bendung Irigasi	N/A	1.116.277.000,00	130.000.000,00	200.000.000,00	236.446.000,00	N/A	1.116.277.000,00	127.560.000,00	198.628.000,00	140.791.850,00	N/A	100,00	101,91	100,69	167,94	-	40%	-15%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	N/A	0	186.066.000,00	624.000.000,00	0	N/A	0	186.066.000,00	623.626.950,00	0,00	N/A	0	100,00	100,06	0	-	25%	34%
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	N/A	100.000.000,00	0	385.000.000,00	661.600.000,00	N/A	99.800.000,00	0	353.781.020,00	606.322.650,00	N/A	100,20	0	108,82	109,12	-	32%	-7%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Operasional Unit Pengelola Irigasi	N/A	150.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00		N/A	149.800.000,00	99.875.000,00	149.666.000,00	0,00	N/A	100,13	100,13	100,22	0,00	-	42%	-21%
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	0	0	0	100.000.000,00	N/A	0	0	0	93.010.700,00	N/A	0	0	0	107,51	0%	0%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	N/A	0	0	0	100.000.000,00	N/A	0	0	0	98.332.900,00	N/A	0	0	0	101,70	0%	0%	
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	N/A	0	0	0	150.000.000,00	N/A	0	0	0	149.690.000,00	N/A	0	0	0	100,21	0%	0%	

Sumber: Dinas SDABK (Data Diolah)

5. Kelompok sasaran Layanan

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, setiap perangkat daerah memiliki kelompok sasaran layanan yang menjadi target utama dari pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kelompok sasaran ini merupakan individu, kelompok, atau institusi yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan oleh perangkat daerah. Penetapan kelompok sasaran layanan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan layanan yang diberikan tepat sasaran, efektif dan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Kabupaten Lamongan merupakan dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, kelompok sasaran layanan Dinas SDABK Kabupaten Lamongan meliputi:

- Pimpinan Daerah dan DPRD

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi menyediakan informasi strategis, dokumen perencanaan, dan rekomendasi kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan kepala daerah dan legislatif.

- Kelompok Masyarakat/Petani

Masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan juga menjadi sasaran dalam proses partisipatif pelayanan irigasi;

B. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan, dilakukan identifikasi permasalahan- permasalahan pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi berdasarkan tugas pokok fungsi teridentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Perumusan Isu Strategi Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi terkendalinya pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Air	Jumlah, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air masih belum optimal penyediaan air baku untuk irigasi terutama didaerah yang non Daerah Irigasi (DI)	Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air	Deindustrialisasi dini dan produktivitas pertanian yang masih rendah			Pengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana irigasi didaerah non DI
Mengembalikan fungsi waduk dan rawa	Menurunnya fungsi waduk dan rawa untuk pengendalian banjir karena alih fungsi lahan	Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan			Menambah tampungan air baku di permukaan melalui revitalisasi tampungan yang sudah ada baik di sungai maupun waduk

Potensi kolaborasi pembangunan infrastruktur sumber daya air dengan BBWS Bengawan Solo dan Dinas PU. Provinsi Jawa Timur	Terbenturnya atas aset kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi maka pembangunan peningkatan kapasitas layanan irigasi menjadi terhambat;	Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air	Pendekatan Kolaborasi Kolaboratif dalam pentahelix dalam perencanaan dan pembangunan	Pembangunan (co-daerah Creation & multi-stakeholder governance)	Kesenjangan antar wilayah dan sektor akibat koordinasi lintas sektor yang lemah	Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengelola Sumber Daya Air sebagai upaya memperkuat rencana pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air
--	---	--	--	---	---	--

a) Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dan pemetaan potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, permasalahan, isu KLHS serta isu-isu relevan yang berkembang di level global, nasional maupun regional, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sebagaimana berikut:

1) Optimalisasikan pembangunan sarana dan prasarana irigasi di daerah non Daerah Irigasi (DI);

Jumlah, kualitas, kontinuitas dan aksesibilitas sumber daya air masih belum optimal. Penyediaan air baku masih menjadi tantangan di Kabupaten Lamongan setiap tahunnya. Kemampuan menyediakan air baku tidak dapat mengejar tingginya laju kebutuhan air yang terus bertambah. Hal tersebut diperparah dengan sebaran ketersediaan air yang tidak merata, sedangkan di daerah dataran rendah potensi air baku pertanian cenderung surplus terhadap kebutuhan.

2) Menambah tampungan air baku di permukaan melalui revitalisasi tampungan yang sudah ada baik di sungai maupun waduk/rawa;

Kondisi sungai di wilayah Kabupaten Lamongan secara umum adalah daya tampung sungai berkurang secara vertikal (Sedimentasi) sementara

penambahan tampungan secara horisontal (pelebaran dan pemanfaatan sempadan) sulit dilakukan. Upaya normalisasi cukup efektif mengurangi resiko banjir di beberapa lokasi sungai, sementara pada lokasi membutuhkan infrastruktur perkuatan tanggul seperti parapet. Kemampuan Kabupaten Lamongan untuk membangun infrastruktur besar pengendali banjir seperti waduk, bendung dan tampungan memanjang masih harus ditingkatkan mengingat infrastruktur tersebut membutuhkan biaya cukup besar.

3) Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengelola Sumber Daya Air sebagai upaya memperkuat rencana pembangunan

Dinamika pembangunan infrastruktur sumber daya air menuntut koordinasi yang kuat dan kolaboratif antar pemangku wilayah maupun masyarakat. Tantangan utama dalam isu ini adalah mengintegrasikan berbagai kepentingan dan perspektif ke dalam satu kesatuan arah pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih. Penguatan kelembagaan mulai dari IP3A, GP3A,

pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan, Dinas PU. Provinsi Jawa Timur dan BBWS Bengawan Solo mekanisme konsultatif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur Sumber daya air yang inklusif dan partisipatif untuk mendukung ketahanan pangan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2025-2029. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah.

Adapun Visi pembangunan Kabupaten Lamongan periode 2025-2029, adalah:

"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang
Berkelanjutan"

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Kejayaan Lamongan** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
2. **Berkeadilan** adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021- 2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi 1

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan

Misi 2

Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman

Misi 3

Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan

Misi 4

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ditengah Kehidupan Masyarakat yang Religius, Harmoni, Berbudaya dan Partisipatif Dalam Pembangunan

Misi 5

Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel

A. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2025-2029. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi 3 “**Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan**”. Fokus misi ke tiga adalah Peningkatan Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Infrastruktur. Dalam rangka mewujudkan kepuasan atas kinerja infrastruktur, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan konektivitas infrastruktur yang merata, pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian terhadap resiko bencana. Sebagai upaya untuk mencapai Misi 3 yakni “**Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan.**”, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah “**Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan**”. Kerangka kinerja pembangunan Misi III RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan

Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Cascading Misi III Pada RPJMD Tahun 2021-2026



Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi III RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni **“Meningkatnya Infrastruktur Dasar Berkualitas Dan Merata”** dengan indikator Indeks Infrastruktur. Sehingga tujuan dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi adalah **“Meningkatkan Sumber Air Baku Secara Merata”**.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Pertanian
2. Meningkatnya Luas Area Bebas Genangan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Adapun logical framework tujuan dan sasaran Badan Perencanaan

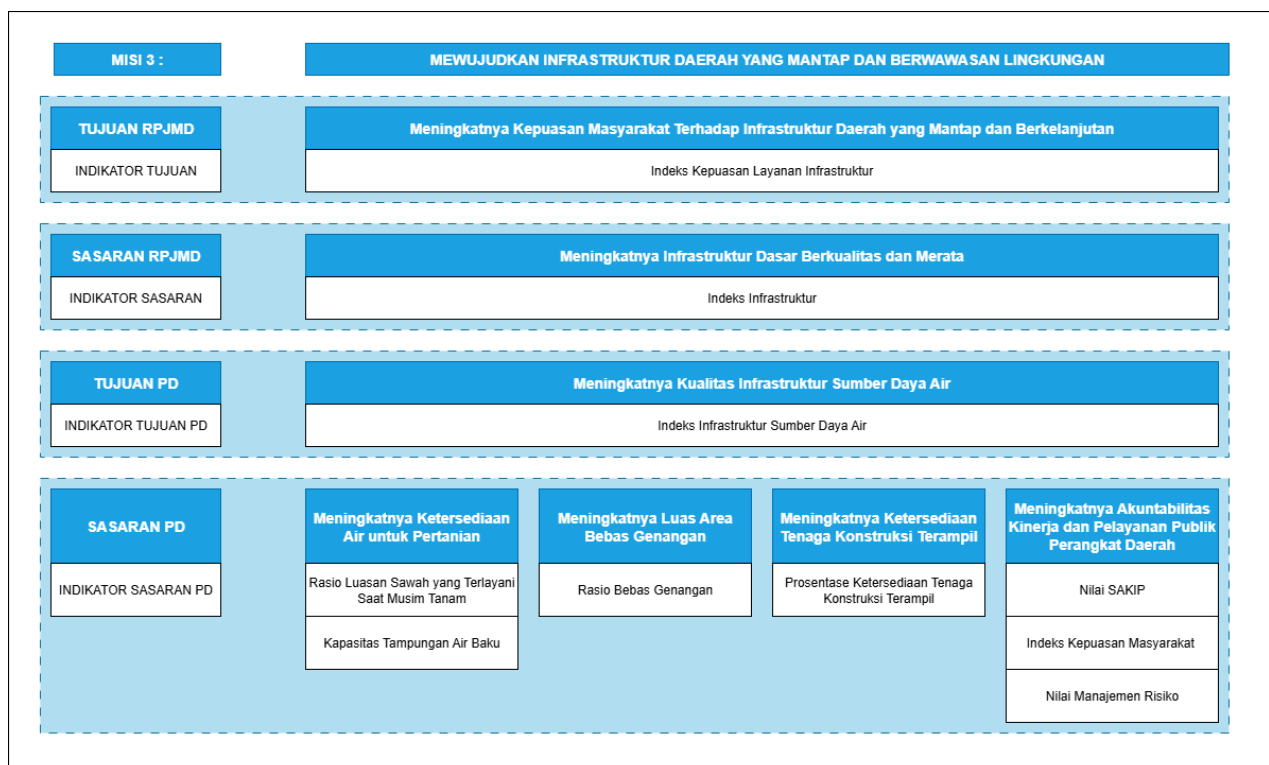
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Tahun 2025-2029

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Sasaran 1: Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Pertanian
	Sasaran 2: Meningkatnya Luas Area Bebas
	Sasaran 3: Prosentase Ketersediaan Tenaga Konstruksi Terampil
	Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 3. 2 Cascading RENSTRA Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Tahun 2025-2029



Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan kordinasi antar lembaga pengelola SDA	Pengendalian pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Air	Revitalisasi kapasitas tampungan waduk, rawa sungai	Pengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana irigasi didaerah non DI	Pemantapan keberlanjutan dan kesiapan menghadapi perubahan iklim dan cuaca

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan kinerja infrastruktur Sumber Daya Air, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan menetapkan strategi pembangunan yang diarahkan untuk memperkuat integrasi sistem perencanaan dibidang Sumber Daya Air. Strategi ini dijabarkan ke dalam tiga pilar utama sebagai berikut:

a) Strategi Pengendalian pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Air

Strategi ini diarahkan untuk pengendalian penerbitan rekomendasi Teknik Sumber Daya Air dan Pengawasan Aset Sumber Daya Air untuk mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur bangunan irigasi maupun bangunan pengendali banjir. Hal ini dilakukan melalui penguatan sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi, penguatan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.

b) Strategi Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Pembangunan Daerah

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Penguatan dilakukan melalui sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang efektif, peningkatan kapasitas SDM perencana dalam manajemen kinerja, serta implementasi reformasi birokrasi tematik yang mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan. Budaya kerja yang berbasis hasil dan pembelajaran terus- menerus menjadi fondasi utama dalam strategi ini.

Berdasarkan strategi pencapaian sasaran yang telah dirumuskan di atas, maka selanjutnya dilakukan penahapan secara periodic untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Adapun penahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Lamongan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.03.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi											
- Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air		Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (Indeks)	79,29	83,75	84,05	84,35	84,65	84,95	85,25	
		Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Pertanian	Rasio Luasan Sawah yang Terlayani Saat Musim Tanam (%)	0	84,5	85	85,5	86	86,5	87	
			Kapasitas Tampungan Air Baku (MA ³)	80.813.439,32	81.113.439,32	81.413.439,32	81.713.439,32	82.013.439,32	82.313.439,32	82.613.439,32	
		Meningkatnya Luas Area Bebas Genangan	Rasio Bebas Genangan (%)	0	31,08	31,58	32,08	32,58	33,08	33,58	
		Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Konstruksi Terampil	Prosentase Ketersediaan Tenaga Konstruksi Terampil (%)	0	48,65	55,61	62,58	69,54	76,5	83,46	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Nilai)	87,51	87,71	87,91	88,11	88,31	88,51	88,71	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,02	88,3	88,61	88,89	89,16	89,42	89,67	
			Nilai Manajemen Risiko (Nilai)	57,46	60	62	64	66	68	70	

Implementasi strategi membutuhkan arah kebijakan. Arah kebijakan ini menjadi pedoman Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil pemetaan operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan RPJMD yang relevan, maka dirumuskan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan

Tujuan PD (1)	Sasaran PD (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan Renstra PD (4)	Ket (5)
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Pertanian	Strategi Pengendalian pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Air	Pengendalian Penerbitan Rekomendasi Teknik Sumber Daya Air	
			Pengendalian dan Pengawasan Aset Sumber Daya Air	
			Revitalisasi kapasitas tampung sungai dan perbaikan tanggul kritis	
			Penguatan kordinasi antar lembaga pengelola	
	Meningkatnya Luas Area Bebas Genangan	Strategi Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola	Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Peduli Sungai	
			Penguatan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan daerah yang akurat dan tepat waktu.	
	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Pembangunan Daerah	Peningkatan kapasitas manajemen kinerja perangkat daerah, khususnya dalam penyusunan IKU/IKD dan pengukuran berbasis hasil.	
			Implementasi reformasi birokrasi tematik melalui penguatan tata kelola, pengawasan internal, dan pelayanan publik yang adaptif.	
			Pengembangan budaya kerja yang responsif dan berbasis hasil di lingkungan perangkat daerah.	
			Meningkatkan pembangunan bendungan, saluran irigasi, dan pengendalian banjir, dan sistem penyediaan air baku melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.	

BAB VI
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					80.299.514.230		80.333.469.212		80.333.469.212		80.333.469.212		80.333.469.212	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.988.216.680		9.992.440.232		9.992.440.232		9.992.440.232		9.992.440.232	
Meningkatnya Kualitas Manajemen Internal Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah yang Tersedia dengan Baik (%)	100	100	100	9.988.216.680	100	9.992.440.232	100	9.992.440.232	100	9.992.440.232	100	9.992.440.232	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					70.031.297.550		70.060.910.585		70.060.910.585		70.060.910.585		70.060.910.585	
Meningkatnya panjang jaringan irigasi berkondisi baik	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota (%)	0	84,25	84,3	26.367.344.500	84,35	26.378.494.047	84,4	26.378.494.047	84,45	26.378.494.047	8,5	26.378.494.047	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Indeks Jaringan Irigasi (Indeks)	82,97	86,8	86,83		87,46		87,86		88,41		88,54		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya luas area bebas genangan	Indeks Bebas Genangan (Indeks)	72,28	77,41	77,53	23.535.000.000	77,64	23.544.951.875	77,76	23.544.951.875	77,88	23.544.951.875	78,1	23.544.951.875	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	0	95,7	95,75		95,8		95,85		95,9		95,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Pertanian	Indeks Air Baku (Indeks)	82,63	86,58	86,87	20.128.953.050	87,16	20.137.464.663	87,45	20.137.464.663	87,73	20.137.464.663	88,02	20.137.464.663	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					280.000.000		280.118.395		280.118.395		280.118.395		280.118.395	

Meningkatnya persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis (%)	0	80	83	280.000.000	85	280.118.395	87	280.118.395	89	280.118.395	91	280.118.395	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan (%)	0	70	77		79		81		83		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
TOTAL KESELURUHAN					80299514230.00		80333469212.00		80333469212.00		80333469212.00		80333469212.00	

Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Lamongan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN							
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)							
1.03.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi														
- Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Pertanian			Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (Indeks)									
					Rasio Luasan Sawah yang Terlayani Saat Musim Tanam (%)									
		Meningkatnya panjang jaringan irigasi berkondisi baik					Kapasitas Tampung Air Baku (M ³)							
							Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
							Indeks Jaringan Irigasi (Indeks)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
							Prosentase panjang jaringan irigasi berkondisi baik		1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
									1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
							Prosentase panjang jaringan irigasi berkondisi baik					1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
												Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
												Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.02.2.02.0030 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Pertanian		Indeks Air Baku (Indeks)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Prosentase ketersediaan air baku	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)	1.03.02.2.01.0078 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.01.0108 - Rehabilitasi Unit Air Baku	
					Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
					Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung	
			Prosentase ketersediaan air baku	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
				Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
				Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
				Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02.0010 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa		
				Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)	1.03.02.2.02.0051 - Pembangunan Bendung Irigasi		
				Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi		
		Meningkatnya Luas Area Bebas Genangan			Rasio Bebas Genangan (%)		
			Meningkatnya luas area bebas genangan		Indeks Bebas Genangan (Indeks)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			prosentase luas area bebas genangan		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
					Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.01.0081 - Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	
					Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.02.2.01.0085 - Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai	
					Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
					Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.01.0122 - Rehabilitasi Kanal Banjir	
				prosentase luas area bebas genangan	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	1.03.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai IKM (Nilai)		
					Nilai SAKIP (Nilai)		
					Nilai Manajemen Risiko (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Manajemen Internal Perangkat Daerah		Prosentase Pelayanan Internal Perangkat Daerah yang Tersedia dengan Baik (%)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersedianya Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Umum Perangkat Daerah untuk Persediaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Ketersediaan			Prosentase Ketersediaan Tenaga Konstruksi Terampil (%)		
		Tenaga Konstruksi Terampil	Meningkatnya persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis (%)	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
					Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten atau kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis atau analis	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01.0010 - Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	1.03.11.2.01.0014 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	
				Jumlah Pekerjaan Konstruksi yang diawasi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	

Mengingat eratny kaitan antara Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021- 2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Sumber Daya Air yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, Dinas Pekerjaan Umum Dinas Sumber Daya Air berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam Perubahan RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pada Tabel 4.2:

Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Lamongan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				80.299.514.230		80.333.469.212		80.333.469.212		80.333.469.212		80.333.469.212		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.988.216.680		9.992.440.232		9.992.440.232		9.992.440.232		9.992.440.232		
Meningkatnya Kualitas Manajemen Internal Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Internal Yang Tersedia dengan Baik	100%	100%	9.988.216.680	100%	9.992.440.232	100%	9.992.440.232	100%	9.992.440.232	100%	9.992.440.232	1.03.0.00.0.00.0 6.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	
	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Yang Selaras	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.139.100		60.164.528		60.164.528		60.164.528		60.164.528		
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	60.139.100	7	60.164.528	7	60.164.528	7	60.164.528	7	60.164.528		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4					
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11.555.700		11.560.586		11.560.586		11.560.586		11.560.586		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	11.555.700	7	11.560.586	7	11.560.586	7	11.560.586	7	11.560.586		
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				36.378.600		36.393.982		36.393.982		36.393.982		36.393.982		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	36.378.600	4	36.393.982	4	36.393.982	4	36.393.982	4	36.393.982		
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.204.800		12.209.960		12.209.960		12.209.960		12.209.960		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	12.204.800	4	12.209.960	4	12.209.960	4	12.209.960	4	12.209.960		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.698.712.340		7.701.967.773		7.701.967.773		7.701.967.773		7.701.967.773		
Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	7.698.712.340	1	7.701.967.773	1	7.701.967.773	1	7.701.967.773	1	7.701.967.773		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	52		52		52		52		52			
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.675.726.740		7.678.972.455		7.678.972.455		7.678.972.455		7.678.972.455		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52	52	7.675.726.740	52	7.678.972.455	52	7.678.972.455	52	7.678.972.455	52	7.678.972.455		
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7.195.500		7.198.542		7.198.542		7.198.542		7.198.542		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	7.195.500	1	7.198.542	1	7.198.542	1	7.198.542	1	7.198.542		
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.988.000		7.991.377		7.991.377		7.991.377		7.991.377		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	7.988.000	18	7.991.377	18	7.991.377	18	7.991.377	18	7.991.377		
1.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				7.802.100		7.805.399		7.805.399		7.805.399		7.805.399		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	7.802.100	1	7.805.399	1	7.805.399	1	7.805.399	1	7.805.399		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
Prosentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian dengan Baik	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	1.000	10	1.000	10	1.000	10	1.000	10	1.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	125	125		125		125		125		125			
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				600		750		750		750		750		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	125	125	600	125	750	125	750	125	750	125	750		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				400		250		250		250		250		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	400	10	250	10	250	10	250	10	250		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				142.231.100		142.291.241		142.291.241		142.291.241		142.291.241		
Prosentase Unit Kinerja Internal yang Terlayani dengan Baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	16	142.231.100	16	142.291.241	16	142.291.241	16	142.291.241	16	142.291.241		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	152	152		152		152		152		152			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	37	37		37		37		37		37			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18	18		18		18		18		18			
1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.208.600		15.215.031		15.215.031		15.215.031		15.215.031		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	16	15.208.600	16	15.215.031	16	15.215.031	16	15.215.031	16	15.215.031		
1.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				17.972.800		17.980.399		17.980.399		17.980.399		17.980.399		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	17.972.800	10	17.980.399	10	17.980.399	10	17.980.399	10	17.980.399		
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				41.705.500		41.723.135		41.723.135		41.723.135		41.723.135		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	37	37	41.705.500	37	41.723.135	37	41.723.135	37	41.723.135	37	41.723.135		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				21.052.200		21.061.102		21.061.102		21.061.102		21.061.102		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	18	18	21.052.200	18	21.061.102	18	21.061.102	18	21.061.102	18	21.061.102		
1.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				15.072.000		15.078.373		15.078.373		15.078.373		15.078.373		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	15.072.000	12	15.078.373	12	15.078.373	12	15.078.373	12	15.078.373		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31.220.000		31.233.201		31.233.201		31.233.201		31.233.201		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	152	152	31.220.000	152	31.233.201	152	31.233.201	152	31.233.201	152	31.233.201		
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				56.104.800		56.128.524		56.128.524		56.128.524		56.128.524		
Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	56.104.800	5	56.128.524	5	56.128.524	5	56.128.524	5	56.128.524		
1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				56.104.800		56.128.524		56.128.524		56.128.524		56.128.524		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	56.104.800	5	56.128.524	5	56.128.524	5	56.128.524	5	56.128.524		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.737.652.790		1.738.387.562		1.738.387.562		1.738.387.562		1.738.387.562		
Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	760	760	1.737.652.790	760	1.738.387.562	760	1.738.387.562	760	1.738.387.562	760	1.738.387.562		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7	7		7		7		7		7			
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.200.000		7.203.044		7.203.044		7.203.044		7.203.044		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	760	760	7.200.000	760	7.203.044	760	7.203.044	760	7.203.044	760	7.203.044		
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				850.328.790		850.688.355		850.688.355		850.688.355		850.688.355		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	850.328.790	4	850.688.355	4	850.688.355	4	850.688.355	4	850.688.355		
1.03.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.140.000		23.149.784		23.149.784		23.149.784		23.149.784		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7	7	23.140.000	7	23.149.784	7	23.149.784	7	23.149.784	7	23.149.784		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				856.984.000		857.346.379		857.346.379		857.346.379		857.346.379		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14	14	856.984.000	14	857.346.379	14	857.346.379	14	857.346.379	14	857.346.379		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				293.375.550		293.499.604		293.499.604		293.499.604		293.499.604		
Prosentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	18	293.375.550	18	293.499.604	18	293.499.604	18	293.499.604	18	293.499.604		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6		6		6		6		6			
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				135.151.800		135.208.949		135.208.949		135.208.949		135.208.949		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	18	135.151.800	18	135.208.949	18	135.208.949	18	135.208.949	18	135.208.949		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				158.223.750		158.290.655		158.290.655		158.290.655		158.290.655		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	158.223.750	6	158.290.655	6	158.290.655	6	158.290.655	6	158.290.655		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				70.031.297.550		70.060.910.585		70.060.910.585		70.060.910.585		70.060.910.585		
Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Pertanian	Indeks Air Baku (Indeks)	82,63	86,87	20.128.953.050	87,16	20.137.464.663	87,45	20.137.464.663	87,73	20.137.464.663	88,02	20.137.464.663	1.03.0.00.0.00.0 6.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				38.713.953.050		38.730.323.410		38.730.323.410		38.730.323.410		38.730.323.410		
Prosentase ketersediaan air baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi (KM)		28	17.178.953.050	28	17.186.217.243	28	17.186.217.243	28	17.186.217.243	28	17.186.217.243		
	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)		16		16		16		16		16			
	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)		52		52		52		52		52			
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)		11		11		11		11		11			
	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)		2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02.2.01.0075 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				90.000.000		90.038.056		90.038.056		90.038.056		90.038.056		
Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)		16	90.000.000	16	90.038.056	16	90.038.056	16	90.038.056	16	90.038.056		
1.03.02.2.01.0078 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota				83.953.050		83.988.549		83.988.549		83.988.549		83.988.549		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (Lembaga)		2	83.953.050	2	83.988.549	2	83.988.549	2	83.988.549	2	83.988.549		
1.03.02.2.01.0108 - Rehabilitasi Unit Air Baku				9.400.000.000		9.403.974.831		9.403.974.831		9.403.974.831		9.403.974.831		
Terehabilitasinya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi (KM)		28	9.400.000.000	28	9.403.974.831	28	9.403.974.831	28	9.403.974.831	28	9.403.974.831		
1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				4.865.000.000		4.867.057.186		4.867.057.186		4.867.057.186		4.867.057.186		
Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)		11	4.865.000.000	11	4.867.057.186	11	4.867.057.186	11	4.867.057.186	11	4.867.057.186		
1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung				2.740.000.000		2.741.158.621		2.741.158.621		2.741.158.621		2.741.158.621		
Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)		52	2.740.000.000	52	2.741.158.621	52	2.741.158.621	52	2.741.158.621	52	2.741.158.621		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				31.317.344.500		31.330.587.175		31.330.587.175		31.330.587.175		31.330.587.175		
Prosentase ketersediaan air baku	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)		5	2.950.000.000	5	2.951.247.420	5	2.951.247.420	5	2.951.247.420	5	2.951.247.420		
	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)													
	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)		7		7		7		7		7			
1.03.02.2.02.0010 - Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan (KM)			0		0		0		0		0		
1.03.02.2.02.0051 - Pembangunan Bendung Irigasi				2.250.000.000		2.250.951.422		2.250.951.422		2.250.951.422		2.250.951.422		
Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (UNIT)		5	2.250.000.000	5	2.250.951.422	5	2.250.951.422	5	2.250.951.422	5	2.250.951.422		
1.03.02.2.02.0053 - Rehabilitasi Bendung Irigasi				700.000.000		700.295.998		700.295.998		700.295.998		700.295.998		
Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)		7	700.000.000	7	700.295.998	7	700.295.998	7	700.295.998	7	700.295.998		
Meningkatnya luas area bebas genangan	Indeks Bebas Genangan (Indeks)	72,28	77,53	23.535.000.000	77,64	23.544.951.875	77,76	23.544.951.875	77,88	23.544.951.875	78,1	23.544.951.875		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	0	95,75		95,8		95,85		95,9		95,95			
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			38.713.953.050		38.730.323.410		38.730.323.410		38.730.323.410		38.730.323.410		38.730.323.410	
prosentase luas area bebas genangan	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)		17.820	21.535.000.000	17.820	21.544.106.167	17.820	21.544.106.167	17.820	21.544.106.167	17.820	21.544.106.167		
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2			
	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		8.200		8.200		8.200		8.200		8.200			
	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)		8.200		8.200		8.200		8.200		8.200			
	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)		27.333		27.333		27.333		27.333		27.333			
	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)		12		12		12		12		12			
1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai			5.100.000.000		5.102.156.557		5.102.156.557		5.102.156.557		5.102.156.557		5.102.156.557	
Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)		17.820	5.100.000.000	17.820	5.102.156.557	17.820	5.102.156.557	17.820	5.102.156.557	17.820	5.102.156.557		
1.03.02.2.01.0081 - Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir			605.000.000		605.255.826		605.255.826		605.255.826		605.255.826		605.255.826	
Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		8.200	605.000.000	8.200	605.255.826	8.200	605.255.826	8.200	605.255.826	8.200	605.255.826		
1.03.02.2.01.0085 - Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir			75.000.000		75.031.714		75.031.714		75.031.714		75.031.714		75.031.714	
Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)		12	75.000.000	12	75.031.714	12	75.031.714	12	75.031.714	12	75.031.714		
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai			6.000.000.000		6.002.537.126		6.002.537.126		6.002.537.126		6.002.537.126		6.002.537.126	
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)		27.333	6.000.000.000	27.333	6.002.537.126	27.333	6.002.537.126	27.333	6.002.537.126	27.333	6.002.537.126		
1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing			6.755.000.000		6.757.856.381		6.757.856.381		6.757.856.381		6.757.856.381		6.757.856.381	
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)		0,2	6.755.000.000	0,2	6.757.856.381	0,2	6.757.856.381	0,2	6.757.856.381	0,2	6.757.856.381		
1.03.02.2.01.0122 - Rehabilitasi Kanal Banjir			3.000.000.000		3.001.268.563		3.001.268.563		3.001.268.563		3.001.268.563		3.001.268.563	
Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)		8.200	3.000.000.000	8.200	3.001.268.563	8.200	3.001.268.563	8.200	3.001.268.563	8.200	3.001.268.563		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			31.317.344.500		31.330.587.175		31.330.587.175		31.330.587.175		31.330.587.175		31.330.587.175	
prosentase luas area bebas genangan	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang Beroperasi (Lembaga)		13	2.000.000.000	13	2.000.845.708	13	2.000.845.708	13	2.000.845.708	13	2.000.845.708		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi				2.000.000.000		2.000.845.708		2.000.845.708		2.000.845.708		2.000.845.708		
Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)		13	2.000.000.000	13	2.000.845.708	13	2.000.845.708	13	2.000.845.708	13	2.000.845.708		
Meningkatnya panjang jaringan irigasi ber kondisi baik	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota (%)	0	84,3	26.367.344.500	84,35	26.378.494.047	84,4	26.378.494.047	84,45	26.378.494.047	8,5	26.378.494.047		
	Indeks Jaringan Irigasi (Indeks)	82,97	86,83			87,46		87,86		88,41		88,54		
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				38.713.953.050		38.730.323.410		38.730.323.410		38.730.323.410		38.730.323.410		
Prosentase panjang jaringan irigasi ber kondisi baik				0		0		0		0		0		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				31.317.344.500		31.330.587.175		31.330.587.175		31.330.587.175		31.330.587.175		
Prosentase panjang jaringan irigasi ber kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)		2,25	26.367.344.500	2,25	26.378.494.047	2,25	26.378.494.047	2,25	26.378.494.047	2,25	26.378.494.047		
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		7.800		7.800		7.800		7.800		7.800			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)		3,3		3,3		3,3		3,3		3,3			
	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)		25		25		25		25		25			
1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				15.115.000.000		15.121.391.444		15.121.391.444		15.121.391.444		15.121.391.444		
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)		2,25	15.115.000.000	2,25	15.121.391.444	2,25	15.121.391.444	2,25	15.121.391.444	2,25	15.121.391.444		
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				11.025.000.000		11.029.661.970		11.029.661.970		11.029.661.970		11.029.661.970		
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)		3,3	11.025.000.000	3,3	11.029.661.970	3,3	11.029.661.970	3,3	11.029.661.970	3,3	11.029.661.970		
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				167.344.500		167.415.262		167.415.262		167.415.262		167.415.262		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		7.800	167.344.500	7.800	167.415.262	7.800	167.415.262	7.800	167.415.262	7.800	167.415.262		
1.03.02.2.02.0030 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota				60.000.000		60.025.371		60.025.371		60.025.371		60.025.371		
Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)		25	60.000.000	25	60.025.371	25	60.025.371	25	60.025.371	25	60.025.371		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				280.000.000		280.118.395		280.118.395		280.118.395		280.118.395		
Meningkatnya persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis (%)	0	83	280.000.000	85	280.118.395	87	280.118.395	89	280.118.395	91	280.118.395	1.03.0.00.0.00.0 6.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	
	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)	0	77		79		81		83		85			
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				245.000.000		245.103.597		245.103.597		245.103.597		245.103.597		
Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten atau kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis atau analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	50	245.000.000	70	245.103.597	90	245.103.597	110	245.103.597	130	245.103.597		
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	0	60		60		60		60		60			
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				70.000.000		70.029.599		70.029.599		70.029.599		70.029.599		
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	50	70.000.000	70	70.029.599	90	70.029.599	110	70.029.599	130	70.029.599		
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				30.000.000		30.012.685		30.012.685		30.012.685		30.012.685		
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	50	30.000.000	50	30.012.685	50	30.012.685	50	30.012.685	50	30.012.685		
1.03.11.2.01.0014 - Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				25.000.000		25.010.571		25.010.571		25.010.571		25.010.571		
Terantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Dokumen)	0	1	25.000.000	1	25.010.571	1	25.010.571	1	25.010.571	1	25.010.571		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				120.000.000		120.050.742		120.050.742		120.050.742		120.050.742		
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	0	60	120.000.000	60	120.050.742	60	120.050.742	60	120.050.742	60	120.050.742		
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		20.008.456		20.008.456		20.008.456		20.008.456		
Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)		1	20.000.000	1	20.008.456	1	20.008.456	1	20.008.456	1	20.008.456		
	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		80		80		80		80		80			
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				10.000.000		10.004.228		10.004.228		10.004.228		10.004.228		
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)		1	10.000.000	1	10.004.228	1	10.004.228	1	10.004.228	1	10.004.228		
1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI				10.000.000		10.004.228		10.004.228		10.004.228		10.004.228		
Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		80	10.000.000	80	10.004.228	80	10.004.228	80	10.004.228	80	10.004.228		
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				15.000.000		15.006.342		15.006.342		15.006.342		15.006.342		
Jumlah Pekerjaan Konstruksi yang diawasi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)		100	15.000.000	100	15.006.342	100	15.006.342	100	15.006.342	100	15.006.342		
1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				15.000.000		15.006.342		15.006.342		15.006.342		15.006.342		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)		100	15.000.000	100	15.006.342	100	15.006.342	100	15.006.342	100	15.006.342		

**Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir
Pemerintah Kabupaten Lamongan**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.03.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi										
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Kapasitas Tampung Air Baku	MÂ³	80.813.439,32	81.113.439,32	81.413.439,32	81.713.439,32	82.013.439,32	82.313.439,32	82.613.439,32	
2	Rasio Bebas Genangan	%	0	31,08	31,58	32,08	32,58	33,08	33,58	
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Prosentase Ketersediaan Tenaga Konstruksi Terampil	%	0	48,65	55,61	62,58	69,54	76,5	83,46	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Nilai SAKIP	Nilai	83,18	83,2	83,28	83,33	83,38	83,4	83,5	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,02	88,32	88,61	88,89	89,16	89,42	89,67	
3	Nilai Manajemen Risiko	Nilai	57,46	60	62	64	66	68	70	
IV	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	0	80	83	85	87	89	91	
2	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persentase	0	95,7	95,75	95,8	95,85	95,9	95,95	
3	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	0	84,25	84,3	84,35	84,4	84,45	8,5	
4	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	0	70	77	79	81	83	85	

Tabel 4. 4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Lamongan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.03.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi				
1.	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Pertanian	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya luas area bebas genangan	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0081 - Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	
		Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Pertanian	1.03.02.2.01.0108 - Rehabilitasi Unit Air Baku	
			1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung	

	Meningkatnya panjang jaringan irigasi berkeondisi baik	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
		1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Lamongan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.03.0.00.0.00.06.0000 - Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi									
2.	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks	79,29	83,75	84,05	84,35	84,65	84,95	85,25	
3.	Prosentase Ketersediaan Tenaga Konstruksi Terampil	%	0	48,65	55,61	62,58	69,54	76,5	83,46	
4.	Rasio Luasan Sawah yang Terlayani Saat Musim Tanam	%	84,02	84,5	85	85,5	86	86,5	87	
5.	Nilai SAKIP	Nilai	83,18	83,2	83,28	83,33	83,38	83,4	83,5	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,02	88,32	88,61	88,89	89,16	89,42	89,67	
7.	Rasio Bebas Genangan	%	0	31,08	31,58	32,08	32,58	33,08	33,58	
8.	Kapasitas Tampung Air Baku	M ³	80.813.439,32	81.113.439,32	81.413.439,32	81.713.439,32	82.013.439,32	82.313.439,32	82.613.439,32	
9.	Nilai Manajemen Risiko	Nilai	57,46	60	62	64	66	68	70	

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kabupaten Lamongan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
2.	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	positif	%	0	80	83	85	87	89	91	
3.	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	positif	%	0	84,25	84,3	84,35	84,4	84,45	8,5	

4.	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	positif	Persentase	0	95,7	95,75	95,8	95,85	95,9	95,95	
5.	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan	positif	%	0	70	77	79	81	83	85	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan pelayanan kepada pelaku pembangunan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025- 2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 merupakan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

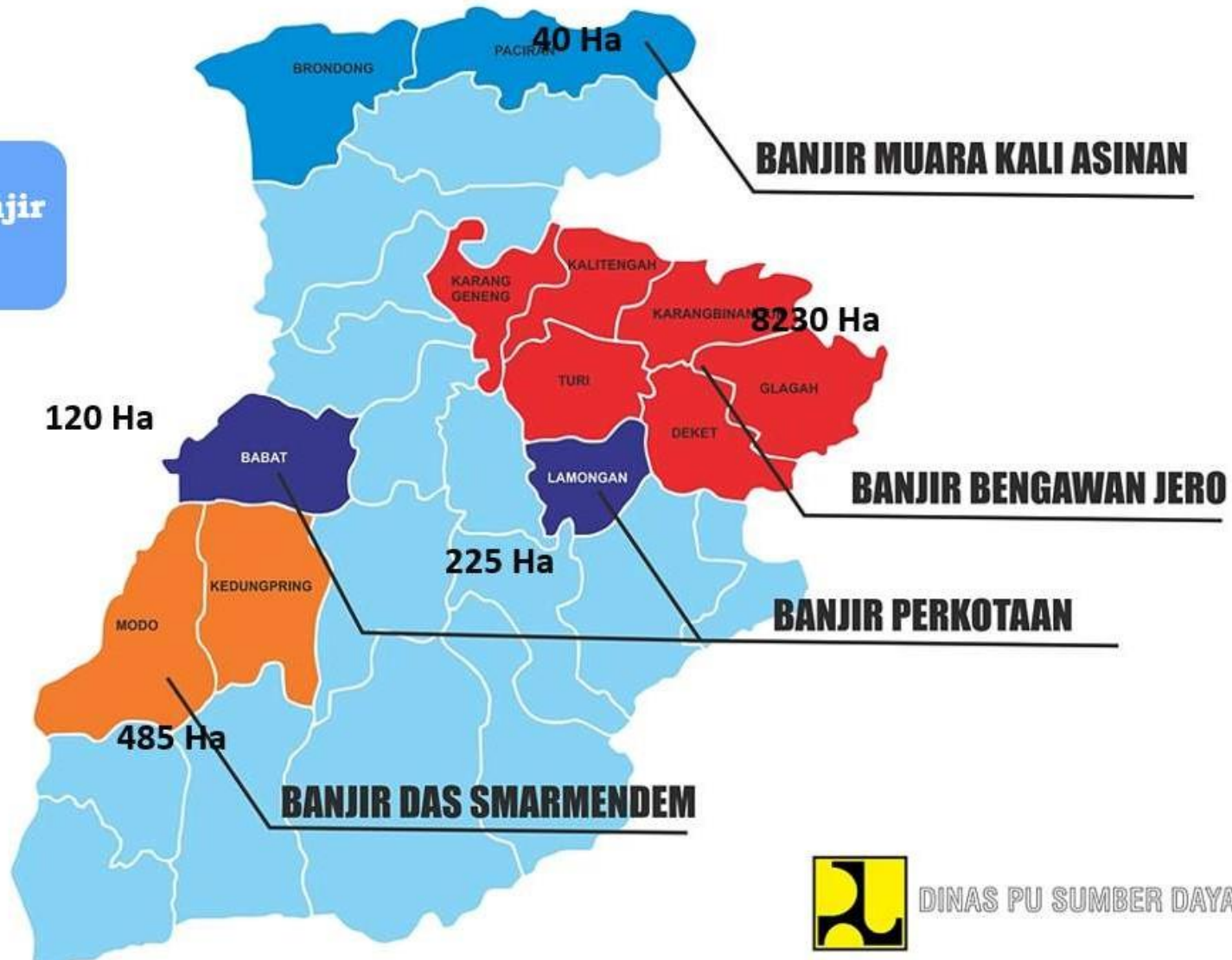
Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi harus tertuang dalam Renja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Diharapkan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten

	Tujuan & Indikator	Formula	Definisi Operasional
1	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	$\frac{\text{indeks air baku} + \text{indeks jaringan irigasi} + \text{indeks bebas genangan}}{3} \times 100$	Indikator ini menghitung indikator kinerja organisasi pemerintah daerah yang terdiri dari indeks air baku, indeks jaringan irigasi, dan indeks bebas genangan
2	Rasio Luasan Sawah yang Terlayani Irigasi Saat Musim Tanam	$\frac{\text{Luas Baku Sawah Yang Terlayani Irigasi Saat Musim Tanam}}{\text{Jumlah Baku Sawah}}$	Indikator ini menghitung luas baku sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam di wilayah Daerah Irigasi (DI)
3	Kapasitas Tampungan Air Baku		Indikator ini menghitung kapasitas tampungan efektif air baku dari waduk kewenangan kabupaten ditambah dengan embung desa
4	Rasio Bebas Genangan	$\frac{\text{Luas Bebas Genangan Banjir}}{\text{Luas Rawan Genangan Banjir}}$	Indikator ini menghitung luas bebas genangan banjir pada daerah rawan genangan banjir
5	Prosentase Ketersediaan Tenaga Konstruksi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Konstruksi yang Tersedia}}{\text{Jumlah Tenaga Konstruksi yang Dibutuhkan (1perusahaanx3org)}}$	Indikator ini menghitung jumlah tenaga konstruksi yang tersedia pada perusahaan jasa konstruksi di kabupaten lamongan yang mengikuti sertifikasi
6	Indeks Air Baku	Menghitung Indeks Air Baku Melalui 3 Tahapan, yaitu : 1. Menghitung Prosentase Ketersediaan air baku dengan rumus : (Jumlah air baku yang ada/Jumlah air baku yang dibutuhkan) x 100% 2. Menghitung Score dari Prosentase Air Baku 3. Pembobotan Score Indeks Air Baku	Yang dimaksud air baku pada indeks air baku adalah sumber daya air yang berasal dari tampungan waduk Daerah Irigasi dan Embung Desa yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota
7	Indeks Jaringan Irigasi	Menghitung Indeks Jaringan Irigasi Melalui 3 Tahapan, yaitu : 1. Menghitung Prosentase Panjang Jaringan Irigasi dengan rumus : (Panjang jaringan irigasi berkondisi baik/Jumlah panjang jaringan irigasi) x 100% 2. Menghitung Score dari Prosentase Panjang Jaringan Irigasi 3. Pembobotan Score Indeks Jaringan Irigasi	Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi
8	Indeks Bebas Genangan	Menghitung Indeks Bebas Genangan Melalui 3 Tahapan, yaitu : 1. Menghitung Prosentase Luas Area Bebas Genangan dengan rumus : (Luas bebas genangan/Luas area rawan genangan) x 100% 2. Menghitung Score dari Prosentase Luas Area Bebas Genangan 3. Pembobotan Score Indeks Bebas Genangan	Area bebas genangan banjir adalah wilayah yang minim risiko tergenang air pada daerah rawan banjir kabupaten
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli bersertifikat}}{\text{Target sertifikat yang tercantum dalam renja}}$	Yang dimaksud tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi adalah seluruh tenaga kerja konstruksi dari beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten dan yang telah mengikuti pelatihan serta mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai operator/teknisi/maupun analis
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	$\frac{(\text{rasio pengawasan tertib usaha} + \text{rasio pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi} + \text{rasio pengawasan tertib pemanfaatan produk})}{3}$	Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dinilai berdasarkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan pemanfaatan produk pada perusahaan jasa konstruksi yang diawasi



**GAMBARAN UMUM WILAYAH RAWAN BANJIR
KABUPATEN LAMONGAN**

**Total Rawan Banjir
9100 Ha**



DINAS PU SUMBER DAYA AIR LAMONGAN

DATA PRASARANA FISIK DAN DOKUMENTASI - DAERAH IRIGASI PERMUKAAN

KAB./KOTA : LAMONGAN

PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Nomenclatur/ Nama D.I.	Luas Areal (Ha)				Sumber Air	Bangunan Utama					Tipe Saluran (Terbuka/Tertutup/C ampuran)	Primer (m)	Saluran		
		Berdasarkan Permen 14/2015	Baku (Pemetaan IGT)	Potensial (Pemetaan IGT)	Sawah/ Fungsional (Pemetaan IGT)		Bendung (Bh)	Kantong Lumpur (m)	Free Intake (Bh)	Embung (Bh)	Pompa (Bh)			Sekunder (KM)	Tersier (KM)	Pembuang (m)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. KABUPATEN																
1	D.I. Bengawan Solo	357	357	357	357	Bengawan Solo			4			Terbuka		4,038	9,05	
2	D.I. Rawa Bogo	297	311	311	311	Embung Rawa Bogo				1		Terbuka		4,170	13,35	
3	D.I. Rawa Bulu	790	790	790	790	Embung Rawa Bulu				1		Terbuka		8,177	22,90	
4	D.I. Rawa Geger	135	202	202	202	Embung Rawa Geger				1		Terbuka		3,589	16,20	
5	D.I. Rawa Kwanon	705	683	683	683	Embung Rawa Kwanon				1		Terbuka		7,814	10,85	
6	D.I. Rawa Manyar	860	856	856	856	Embung Rawa Manyar				1		Terbuka		10,440	24,80	
7	D.I. Rawa Sibanget	365	379	379	379	Embung Rawa Sibanget				1		Terbuka		5,380	16,00	
8	D.I. Rawa Sogo	222	227	227	227	Embung Rawa Sogo				1		Terbuka		9,790	8,10	
9	D.I. Sl. Keyongan	696	718	718	718	Sungai Keyongan	1	1				Terbuka		6,590	21,80	
10	D.I. Waduk Bowo	670	672	672	672	Embung Waduk Bowo				1		Terbuka		7,630	19,45	
11	D.I. Waduk Caling	509	536	536	536	Embung Waduk Caling				1		Terbuka		9,310	8,52	
12	D.I. Waduk Canggih	358	358	358	358	Embung Waduk Bowo				1		Terbuka		4,532	4,90	
13	D.I. Waduk Delikguno	257	262	262	262	Embung Waduk Delikguno				1		Terbuka		5,017	3,15	
14	D.I. Waduk Dukuh	145	148	148	148	Embung Waduk Dukuh				1		Terbuka		5,206	1,57	
15	D.I. Waduk Jajong	497	471	471	471	Embung Waduk Jajong				1		Terbuka		12,460	2,60	
16	D.I. Waduk Kuripan	202	203	203	203	Embung Waduk Kuripan				1		Terbuka		5,200	3,19	
17	D.I. Waduk Legoh	57	64	64	64	Embung Waduk Legoh				1		Terbuka		2,620	6,95	
18	D.I. Waduk Makam Santri	302	213	213	213	Embung Makam Santri				1		Terbuka		4,320	2,48	
19	D.I. Waduk Meduran	225	229	229	229	Embung Waduk Meduran				1		Terbuka		11,000	1,50	
20	D.I. Waduk Pading	487	489	489	489	Embung Waduk Pading				1		Terbuka		16,800	10,75	
21	D.I. Waduk Palangan	334	432	432	432	Embung Waduk Palangan				1		Terbuka		1,530	2,80	
22	D.I. Waduk Paprit	144	147	147	147	Embung Waduk Paprit				1		Terbuka		4,200	2,35	
23	D.I. Waduk Sumur Gung	123	126	126	126	Embung Waduk Sumur Gung				1		Terbuka		5,700	0,90	
24	D.I. Waduk Takeran	285	286	286	286	Embung Waduk Takeran				1		Terbuka		4,670	6,25	
25	D.I. Waduk Tuwiri	449	431	431	431	Embung Waduk Tuwiri				1		Terbuka		5,580	3,80	
26	D.I. Wd. Dermo	50	52	52	52	Embung Wd. Dermo				1		Terbuka		2,378	0,30	
27	D.I. Wd. Kedungdowo	16	17	17	17	Embung Waduk Kedungdowo				1		Terbuka		1,080	8,62	
28	D.I. Wd. Lembeyan	20	20	20	20	Embung WadukLembeyan				1		Terbuka		0,490	8,35	
29	D.I. Nganjuk	286	249	249	249	Embung Waduk Nganjuk				1		Terbuka		3,600	5,80	
30	D.I. PA. Karanggeneng	797	800	800	800	Bengawan Solo					2	Terbuka		8,410	31,60	
31	D.I. PA. Tejoasri	-	115	115	115	Bengawan Solo					1	Terbuka		1,950		
B. PROPINSI																
32	D.I. Rawa Cungkup	1.274	1.198	1.198	1.198	Rawa Cungkup	1					Terbuka		5,491	53.800	1.420
33	D.I. Rawa Sekaran	1.779	1.597	1.597	1.597	Rawa Sekaran	1					Terbuka	4,195	6,455		
34	D.I. Rawa Semando	1.661	1.708	1.708	1.708	Rawa Semando	1					Terbuka		17,707	40.196	

35	D.I	Wd. Rande	1.044	1.013	1.013	1.013	Waduk Rande	1					Terbuka		11,930	14,340	
36	D.I	Rawa Jabung	2.143	2.379	2.379	2.379	Rawa Jabung	1					Terbuka	1,000	10,000	41,750	
37	D.I	Kali Corong	2.721	2.357	2.357	2.357	Kali Corong	1					Terbuka	12,000		44,483	
38	D.I.P.	Butungan	1.185	1.083	1.083	1.083	Sungai Bengawan Solo	5					Terbuka		15,066	23,955	14,260
39	D.I.P.	Kali German	1.120	1.324	1.324	1.324	Sungai B. Solo, K. Patih	2					Terbuka		10,712	35,018	3,500
C. IIRIGASI DESA																	
40	D.I	IRIGASI DESA													987,970		
D. PUSAT																	
41	D.I	GONDANG												16,270	96,190	15,37	
42	D.I	PRIJETAN												7,580	24,830	9,65	
43	D.I	JERO												32,490	53,620	14,33	
Total			10640	10843	10843	10843		1	1	4	27	3		73,535	1.423,642	253.860,230	0

DAFTAR EVALUASI WADUK DAN RAWA
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

PERIODE TANGGAL :

NO.	NAMA DAERAH IRIGASI (KEWENANGAN)			LOKASI (KEC)	KAPASITAS (M3)	PEILSCHAAL		REALISASI		%
	DAERAH	PROVINSI	PUSAT			BD	NP	PEIL	VOLUME	
	UPT PSDA DEKET									
1			Wd. Gondang	Sugio	19.771.783	29,40	38,00			
2			Wd. Karangasem	Sugio	140.000	21,46	23,03			
3			Wd. German	Sugio	1.237.500	21,35	25,75			
4			Wd. Bl.ganggang	Sukodadi	1.518.750	7,18	9,89			
5			Wd. Gempol	Kb.bahu	2.050.000	6,22	8,27			
6			Wd. Mojomanis	Kb.bahu	262.756	13,60	16,25			
7			Wd. Lopang	Kb.bahu	241.145	10,00	12,30			
8			Wd. Rancang	Lamongan	817.142	5,00	8,36			
9			Wd. Joto	Tikung	1.000.000	2,10	6,40			
10		Wd. Rande		Deket	444.196	-0,95	+0,62			
11	Wd. Takeran			Tikung	490.181	11,50	13,75			
12	Wd. Dukuh			Tikung	74.945	8,14	9,50			
13	Wd. Dermo			Sarirejo	43.230	15,00	16,32			
14	Wd. Delikguno			Tikung	419.688	6,02	9,30			
15	Wd. Tuwiri			Tikung	416.892	2,19	4,54			
16	Wd. Canggih			Sarirejo	425.040	1,45	4,09			
17	Wd. Kedungdowo			Kb.bahu	116.250	17,75	20,35			
18	Wd. Lembeyan			Kb.bahu	50.400	18,94	20,54			
19	Wd. Caling			Sugio	1.157.088	35,25	39,38			
	UPT PSDA BABAT									
20			Wd. Prijetan	Kd.pring	9.379.304	32,00	49,00			
21			Wd. Kalen	Kd.pring	600.000	18,52	21,17			
22			Wd. Sentir	Kd.pring	1.250.000	27,39	32,27			
23	Wd. Bowo			Modo	1.685.552	26,00	32,28			
24	Rw. Sogo			Babat	577.600	4,00	5,70			
25	Wd. Kuripan			Babat	83.000	4,70	6,00			
26	Wd. Pading			Pucuk	205.900	9,00	10,34			
27	Rw. Manyar			Sekaran	2.842.000	2,00	4,10			
28	Rw. Bulu			Sekaran	2.583.000	1,14	3,60			
29	Rw. Kwanon			Pucuk	1.520.000	0,45	2,70			
30		Rw. Semando		Babat	954.000	1,50	2,40			
31		Rw. Cungkup		Pucuk	4.620.000	0,75	3,20			
	UPT PSDA KARANGGENENG									
32		Rw. Jabung		Laren	48.041.440	2,00	4,00			
33		Rw. Sekaran		Sekaran	7.376.000	-0,39	+2,27			
34	Wd. Makamsantri			Laren	609.000	11,15	15,90			
35	Wd. Jajong			Laren	951.600	11,00	16,45			
36	Wd. Sumurgung			Laren	357.200	10,90	15,85			
37	Wd. Paprit			Laren	278.400	12,00	15,85			
38	Wd. Sepanji			Maduran	-	-	-			
39	Rw. Bogo			Kr.geneng	755.250	-1,26	+0,79			
40	Wd. Legoh			Kr.geneng	350.900	2,38	3,94			
41	Wd. Meduran			Maduran		2,20	4,30			
	UPT PSDA KURO									
42	Rw. Sibanget			Kr.geneng	373.750	-1,43	+0,52			
43	Rw. Geger			Turi	490.900	-0,26	+0,86			
44	Wd. Palangan			Kalitengah	509.812	-1,00	+1,25			
			J U M L A H		117.071.594					

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
BIDANG BINA PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
DATA BASE KONDISI AIR BAKU EMBUNG DESA
TAHUN 2024

No	Nama Embung Desa	Lokasi		Luasan Waduk (ha)	Baku sawah (ha)	Fungsi	Kapasitas Efektif Embung (m ³)	Volume Sedimentasi (m ³)	Kapasitas Embung Saat ini	
		Desa/Kelurahan	Kec.						(m3)	%
1	Karandowo	Bulumargi	Babat	2,00	40,00	Irigasi	36.000,00	11.797,45	24.202,55	67,23
2	Gumurung	Bulumargi	Babat	1,50	35,00	Irigasi	27.000,00	15.120,00	11.880,00	44,00
3	Embonganyar	Bulumargi	Babat	2,00	50,00	Irigasi	36.000,00	16.920,00	19.080,00	53,00
4	Awar-awar	Bulumargi	Babat	3,00	60,00	Irigasi	54.000,00	27.540,00	26.460,00	49,00
5	Podang	Bulumargi	Babat	1,50	35,00	Irigasi	27.000,00	9.450,00	17.550,00	65,00
6	Bulugondang	Bulumargi	Babat	1,20	0,00	Irigasi	21.600,00	1.080,00	20.520,00	95,00
7	Podang	Karangkembang	Babat	0,80	10,00	Irigasi	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00
8	Keyongan	Keyongan	Babat	1,00	35,00	Irigasi	18.000,00	7.640,00	10.360,00	57,56
9	Leran	Keyongan	Babat	5,30	100,00	Irigasi	95.400,00	48.654,00	46.746,00	49,00
10	Kuripan	Kuripan	Babat	2,00	35,00	Irigasi dan Air Baku	36.000,00	18.360,00	17.640,00	49,00
11	Gesing	Patihan	Babat	2,00	45,00	Irigasi	36.000,00	12.170,00	23.830,00	66,19
12	Pucakwangi	Pucakwangi	Babat	0,50	55,00	Irigasi dan Air Baku	9.000,00	2.700,00	6.300,00	70,00
13	Sambanganlor	Sambangan	Babat	3,50	85,00	Irigasi	63.000,00	20.420,00	42.580,00	67,59
14	Sambangkidul	Sambangan	Babat	2,00	50,00	Irigasi	36.000,00	18.360,00	17.640,00	49,00
15	Ploro	Sumurgenuk	Babat	2,00	50,00	Irigasi	36.000,00	9.000,00	27.000,00	75,00
16	Sumurgenuk	Sumurgenuk	Babat	2,00	60,00	Irigasi	36.000,00	13.680,00	22.320,00	62,00
17	Polaman	Bluluk	Bluluk	3,00	60,00	Irigasi	54.000,00	27.540,00	26.460,00	49,00
18	Bronjong	Bronjong	Bluluk	0,42	0,00	Air Baku	7.560,00	0,00	7.560,00	100,00
19	Cangkring	Cangkring	Bluluk	0,60	10,00	Irigasi	10.800,00	1.080,00	9.720,00	90,00
20	Kuwurejo	Kuwurejo	Bluluk	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
21	Primpén	Primpén	Bluluk	0,60	10,00	Air Baku	10.800,00	1.080,00	9.720,00	90,00
22	Songowareng	Songowareng	Bluluk	1,00	10,00	Irigasi	18.000,00	3.795,53	14.204,47	78,91
23	Namar	Sumberbanjar	Bluluk	5,00	60,00	Irigasi	90.000,00	49.700,00	40.300,00	44,78
24	Talunrejo	Talunrejo	Bluluk	0,50	20,00	Irigasi	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
25	Kayen	Talunrejo	Bluluk	0,60	20,00	Irigasi	10.800,00	1.080,00	9.720,00	90,00
26	Brengkok I	Brengkok	Brondong	4,80	106,00	Irigasi	86.400,00	30.257,77	56.142,23	64,98
27	Brengkok II	Brengkok	Brondong	2,40	42,00	Irigasi	43.200,00	20.304,00	22.896,00	53,00
28	Brengkok III	Brengkok	Brondong	1,00	20,00	Irigasi	18.000,00	9.180,00	8.820,00	49,00
29	Lembor	Lembor	Brondong	7,00	60,00	Irigasi	126.000,00	69.360,00	56.640,00	44,95
30	Moyorete	Brengkok	Brondong	1,00	20,00	Irigasi	18.000,00	4.320,00	13.680,00	76,00
31	Sendangrejo	Sendangrejo	Brondong	1,00	10,00	Irigasi	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
32	Pandanpancur	Pandanpancur	Deket	0,70	10,00	Air Baku	12.600,00	1.260,00	11.340,00	90,00
33	Puncel	Deketwetan	Deket	1,00	10,00	Air Baku	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
34	Srirande	Srirande	Deket	0,80	10,00	Air Baku	14.400,00	1.440,00	12.960,00	90,00
35	Rejoasri	Deket	Glagah	1,00	20,00	Air Baku	18.000,00	4.040,00	13.960,00	77,56
36	Nganti	Menganti	Glagah	1,00	20,00	Air Baku	18.000,00	5.000,00	13.000,00	72,22
37	Tanggungprigel	Tanggungprigel	Glagah	1,00	20,00	Air Baku	18.000,00	5.040,00	12.960,00	72,00
38	Kuluran	Kuluran	Kalitengah	2,30	40,00	Irigasi	41.400,00	15.732,00	25.668,00	62,00
39	Gumelem	Banjarrejo	Kedungpring	3,00	70,00	Irigasi	54.000,00	15.937,45	38.062,55	70,49
40	Banjaranyar	Banjarrejo	Kedungpring	0,50	10,00	Irigasi	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
41	Tlg. Blawi	Blawirejo	Kedungpring	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
42	Dradah	Drdh.blumbang	Kedungpring	1,40	88,00	Irigasi	25.200,00	9.576,00	15.624,00	62,00
43	Blumbang	Drdh.blumbang	Kedungpring	1,10	266,00	Irigasi	19.800,00	8.316,00	11.484,00	58,00
44	Jatidrojog	Jatidrojog	Kedungpring	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	3.960,00	14.040,00	78,00
45	Batu	Kedungpring	Kedungpring	3,30	30,00	Irigasi	59.400,00	19.602,00	39.798,00	67,00
46	Keradenan	Keradenanrejo	Kedungpring	2,20	40,00	Irigasi	39.600,00	12.672,00	26.928,00	68,00
47	Ngasem	Keradenanrejo	Kedungpring	0,80	0,00	Air Baku	14.400,00	1.440,00	12.960,00	90,00
48	Ngepung	Keradenanrejo	Kedungpring	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
49	Tlebung	Mojodadi	Kedungpring	0,40	0,00	Air Baku	7.200,00	720,00	6.480,00	90,00
50	Mojorembun	Mojodadi	Kedungpring	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	8.640,00	9.360,00	52,00
51	Lebak	Sukomalo	Kedungpring	5,50	50,00	Irigasi	99.000,00	32.670,00	66.330,00	67,00
52	Malo	Sukomalo	Kedungpring	5,00	60,00	Irigasi	90.000,00	29.700,00	60.300,00	67,00
53	Sukogeneng	Sukomalo	Kedungpring	1,00	10,00	Irigasi	18.000,00	3.420,00	14.580,00	81,00
54	Kabluk	Sukomalo	Kedungpring	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
55	Longgean	Sukomalo	Kedungpring	1,30	0,00	Air Baku	23.400,00	0,00	23.400,00	100,00
56	Sumengko	Sumengko	Kedungpring	2,50	60,00	Irigasi	45.000,00	12.318,09	32.681,91	72,63
57	Cerokan	Tenggerrejo	Kedungpring	2,10	65,00	Irigasi	37.800,00	12.474,00	25.326,00	67,00
58	Maindu I	Maindu	Kedungpring	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
59	Maindu II	Maindu	Kedungpring	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
60	Sidobangun	Sidobangun	Kedungpring	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00

No	Nama Embung Desa	Lokasi		Luasan Waduk (ha)	Baku sawah (ha)	Fungsi	Kapasitas Efektif Embung (m ³)	Volume Sedimentasi (m ³)	Kapasitas Embung Saat ini	
		Desa/Kelurahan	Kec.						(m3)	%
61	Juwet	Doyomulyo	Kembangbahu	2,00	20,00	Irigasi	36.000,00	10.080,00	25.920,00	72,00
62	Doyomulyo	Doyomulyo	Kembangbahu	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	8.460,00	9.540,00	53,00
63	Dogo	Dumpiangung	Kembangbahu	0,60	0,00	Air Baku	10.800,00	4.536,00	6.264,00	58,00
64	Dumpi	Dumpiangung	Kembangbahu	1,50	0,00	Air Baku	27.000,00	12.690,00	14.310,00	53,00
65	Kedungbulu	Dumpiangung	Kembangbahu	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
66	Tugu	Dumpiangung	Kembangbahu	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	7.560,00	10.440,00	58,00
67	Duri	Dumpiangung	Kembangbahu	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	9.360,00	8.640,00	48,00
68	Gintungan	Gintungan	Kembangbahu	2,00	0,00	Air Baku	36.000,00	8.521,70	27.478,30	76,33
69	Mojogede	Gintungan	Kembangbahu	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	9.180,00	8.820,00	49,00
70	Kedungagunglor	Gintungan	Kembangbahu	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	5.040,00	3.960,00	44,00
71	Kedungagungkidul	Gintungan	Kembangbahu	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	4.590,00	4.410,00	49,00
72	Kalibogo	Kaliwates	Kembangbahu	3,50	25,00	Irigasi dan Air Baku	63.000,00	8.521,70	54.478,30	86,47
73	Bogo	Kaliwates	Kembangbahu	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
74	Balan	Kaliwates	Kembangbahu	1,75	20,00	Irigasi dan Air Baku	31.500,00	6.930,00	24.570,00	78,00
75	Wangkit	Kaliwates	Kembangbahu	1,05	0,00	Air Baku	18.900,00	6.237,00	12.663,00	67,00
76	Ragas	Katemas	Kembangbahu	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	2.160,00	6.840,00	76,00
77	Mergayu	Katemas	Kembangbahu	3,00	0,00	Air Baku	54.000,00	18.685,00	35.315,00	65,40
78	Kalitemu	Katemas	Kembangbahu	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
79	Tanah	Katemas	Kembangbahu	1,50	0,00	Air Baku	27.000,00	4.050,00	22.950,00	85,00
80	Kedungasri	Kedungasri	Kembangbahu	1,50	0,00	Air Baku	27.000,00	2.700,00	24.300,00	90,00
81	Bender	Kedungasri	Kembangbahu	2,00	0,00	Air Baku	36.000,00	6.037,45	29.962,55	83,23
82	Sukorejo	Kembangbahu	Kembangbahu	0,85	10,00	Irigasi	15.300,00	5.814,00	9.486,00	62,00
83	Randegan	Kembangbahu	Kembangbahu	1,50	25,00	Irigasi	27.000,00	5.130,00	21.870,00	81,00
84	Kulon	Kembangbahu	Kembangbahu	2,90	0,00	Air Baku	52.200,00	12.528,00	39.672,00	76,00
85	Kembangbahu	Kembangbahu	Kembangbahu	0,85	10,00	Irigasi	15.300,00	4.284,00	11.016,00	72,00
86	Kedungklanting	Kedungmegaroh	Kembangbahu	0,85	10,00	Irigasi	15.300,00	3.672,00	11.628,00	76,00
87	Mojodadi	Lopang	Kembangbahu	2,85	20,00	Irigasi dan Air Baku	51.300,00	7.695,00	43.605,00	85,00
88	Lopang	Lopang	Kembangbahu	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	2.700,00	15.300,00	85,00
89	Mojorembun	Lopang	Kembangbahu	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	3.420,00	14.580,00	81,00
90	Mojosari	Lopang	Kembangbahu	0,80	0,00	Air Baku	14.400,00	1.440,00	12.960,00	90,00
91	Sumberpanggang	Lopang	Kembangbahu	3,40	0,00	Air Baku	61.200,00	14.497,70	46.702,30	76,31
92	Wringinanom	Lopang	Kembangbahu	0,80	0,00	Air Baku	14.400,00	1.440,00	12.960,00	90,00
93	Maor I	Maor	Kembangbahu	2,80	0,00	Air Baku	50.400,00	9.576,00	40.824,00	81,00
94	Maor II	Maor	Kembangbahu	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	4.320,00	13.680,00	76,00
95	Gampengareng	Moronyamplung	Kembangbahu	1,90	15,00	Irigasi dan Air Baku	34.200,00	16.074,00	18.126,00	53,00
96	Kalipang	Pelang	Kembangbahu	2,10	0,00	Air Baku	37.800,00	15.876,00	21.924,00	58,00
97	Pelang	Pelang	Kembangbahu	1,50	0,00	Air Baku	27.000,00	10.260,00	16.740,00	62,00
98	Kalipang	Pelang	Kembangbahu	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	7.560,00	10.440,00	58,00
99	Sungeigeneng	Pelang	Kembangbahu	0,80	0,00	Air Baku	14.400,00	6.048,00	8.352,00	58,00
100	Puter	Puter	Kembangbahu	1,00	15,00	Irigasi dan Air Baku	18.000,00	5.040,00	12.960,00	72,00
101	Tempuran	Puter	Kembangbahu	3,00	35,00	Irigasi dan Air Baku	54.000,00	12.481,70	41.518,30	76,89
102	Puterpondok	Puter	Kembangbahu	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	5.040,00	12.960,00	72,00
103	Miru	Puter	Kembangbahu	0,80	0,00	Air Baku	14.400,00	1.440,00	12.960,00	90,00
104	Pucung	Puter	Kembangbahu	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
105	Randubener	Randubener	Kembangbahu	2,50	35,00	Irigasi dan Air Baku	45.000,00	18.100,00	26.900,00	59,78
106	Sidobranti	Sidomukti	Kembangbahu	1,40	0,00	Air Baku	25.200,00	7.423,81	17.776,19	70,54
107	Sukowati	Sukosongo	Kembangbahu	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	7.920,00	10.080,00	56,00
108	Kedungkampil	Sukosongo	Kembangbahu	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	3.780,00	5.220,00	58,00
109	Karangtengah	Sukosongo	Kembangbahu	0,40	0,00	Air Baku	7.200,00	2.448,00	4.752,00	66,00
110	Slatung	Tlagoagung	Kembangbahu	6,10	70,00	Irigasi dan Air Baku	109.800,00	54.998,00	54.802,00	49,91
111	Kendat	Tlagoagung	Kembangbahu	3,50	40,00	Irigasi dan Air Baku	63.000,00	28.980,00	34.020,00	54,00
112	Guno / Besi	Tlagoagung	Kembangbahu	4,50	57,00	Irigasi	81.000,00	33.795,00	47.205,00	58,28
113	Tlago	Tlagoagung	Kembangbahu	0,40	0,00	Air Baku	7.200,00	720,00	6.480,00	90,00
114	Bonsari	Palangan	Karangbinangun	4,40	68,00	Irigasi	79.200,00	37.224,00	41.976,00	53,00
115	Kebet	Kebet	Lamongan	0,80	0,00	Air Baku	14.400,00	1.440,00	12.960,00	90,00
116	Kramat	Kramat	Lamongan	1,30	0,00	Air Baku	23.400,00	9.000,00	14.400,00	61,54
117	Blungkan	Sendangrejo	Lamongan	0,75	10,00	Air Baku	13.500,00	675,00	12.825,00	95,00
118	Sawo	Sumberjo	Lamongan	1,50	0,00	Air Baku	27.000,00	2.700,00	24.300,00	90,00
119	Kaotan	Sumberjo	Lamongan	0,75	10,00	Air Baku	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
120	Plandi	Sumberjo	Lamongan	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
121	Telogo Supeno	Sidokumpul	Lamongan	1,50	0,00	Air Baku	27.000,00	2.700,00	24.300,00	90,00
122	Gajah Mada	Tlagoanyar	Lamongan	1,00	0,00	Air Baku	27.000,00	22.500,00	4.500,00	16,67
123	Bangkal	Rancangkencono	Lamongan	0,60	0,00	Air Baku	10.800,00	1.080,00	9.720,00	90,00
124	Sekarputih	Rancangkencono	Lamongan	0,40	0,00	Air Baku	7.200,00	720,00	6.480,00	90,00

No	Nama Embung Desa	Lokasi		Luasan Waduk (ha)	Baku sawah (ha)	Fungsi	Kapasitas Efektif Embung (m ³)	Volume Sedimentasi (m ³)	Kapasitas Embung Saat ini	
		Desa/Kelurahan	Kec.						(m3)	%
125	Mojoarjo	Mojoarjo	Mojoarjo	1,00	25,00	Irigasi	18.000,00	9.180,00	8.820,00	49,00
126	Guwo	Yung Yang	Mojoarjo	1,00	25,00	Air Baku	18.000,00	4.540,00	13.460,00	74,78
127	Balong	Jegreg	Mojoarjo	0,70	0,00	Air Baku	12.600,00	3.024,00	9.576,00	76,00
128	Gowah	Sidodowo	Mojoarjo	3,00	46,00	Irigasi	54.000,00	15.120,00	38.880,00	72,00
129	Sidodowo	Sidodowo	Mojoarjo	1,00	25,00	Irigasi	18.000,00	5.840,00	12.160,00	67,56
130	Lengkir	Kacangan	Mojoarjo	17,00	50,00	Irigasi	306.000,00	195.800,00	110.200,00	36,01
131	Keplak	Kacangan	Mojoarjo	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
132	Pule	Pule	Mojoarjo	3,00	70,00	Irigasi	54.000,00	27.540,00	26.460,00	49,00
133	Jatipayak	Jatipayak	Mojoarjo	3,00	60,00	Irigasi	54.000,00	25.380,00	28.620,00	53,00
134	Kedungrejo	Kedungrejo	Mojoarjo	0,75	10,00	Irigasi dan Air Baku	13.500,00	5.130,00	8.370,00	62,00
135	Mambung	Sambungrejo	Mojoarjo	0,80	10,00	Irigasi dan Air Baku	14.400,00	6.048,00	8.352,00	58,00
136	Jantok	Sambungrejo	Mojoarjo	1,00	10,00	Irigasi dan Air Baku	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
137	Yung Yang	Yung Yang	Mojoarjo	1,00	25,00	Irigasi	18.000,00	4.320,00	13.680,00	76,00
138	Graman	Sambungrejo	Mojoarjo	4,50	35,00	Irigasi	81.000,00	26.730,00	54.270,00	67,00
139	Gridi	Kedukbembem	Mantup	1,00	20,00	Irigasi dan Air Baku	18.000,00	8.460,00	9.540,00	53,00
140	Banyuwat	Kedukbembem	Mantup	0,80	0,00	Air Baku	14.400,00	6.048,00	8.352,00	58,00
141	Jatisari	Kedukbembem	Mantup	1,60	0,00	Air Baku	28.800,00	14.688,00	14.112,00	49,00
142	Gunungrawe	Kedungsoko	Mantup	3,45	35,00	Irigasi	62.100,00	20.493,00	41.607,00	67,00
143	Ringinanom	Kedungsoko	Mantup	0,80	15,00	Irigasi dan Air Baku	14.400,00	1.440,00	12.960,00	90,00
144	Waton	Mantup	Mantup	1,40	15,00	Irigasi	25.200,00	4.088,00	21.112,00	83,78
145	Tawang Sari	Rumpuk	Mantup	1,43	15,00	Irigasi	25.740,00	2.574,00	23.166,00	90,00
146	Glugu	Mantup	Mantup	2,40	20,00	Irigasi	43.200,00	9.568,00	33.632,00	77,85
147	Kopen	Mantup	Mantup	1,55	0,00	Air Baku	27.900,00	6.812,00	21.088,00	75,58
148	Oro-oro Ombo	Mantup	Mantup	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	3.320,00	14.680,00	81,56
149	Sambilan	Mantup	Mantup	0,75	0,00	Air Baku	13.500,00	1.350,00	12.150,00	90,00
150	Sidobinangun	Mojosari	Mantup	1,40	15,00	Irigasi	25.200,00	10.477,00	14.723,00	58,42
151	Sendangsari	Mojosari	Mantup	1,55	67,00	Irigasi	27.900,00	6.207,00	21.693,00	77,75
152	Belusarirejo	Mojosari	Mantup	1,10	25,00	Irigasi dan Air Baku	19.800,00	990,00	18.810,00	95,00
153	Mojoarjo	Mojosari	Mantup	1,50	25,00	Irigasi dan Air Baku	27.000,00	11.340,00	15.660,00	58,00
154	Sembung	Sidomulyo	Mantup	1,50	20,00	Irigasi dan Air Baku	27.000,00	16.925,00	10.075,00	37,31
155	Sidomulyo	Sidomulyo	Mantup	1,55	15,00	Irigasi dan Air Baku	27.900,00	6.280,45	21.619,55	77,49
156	Ngaglik	Sidomulyo	Mantup	1,50	20,00	Irigasi	27.000,00	5.130,00	21.870,00	81,00
157	Sukobendu	Sukobendu	Mantup	3,20	60,00	Irigasi	57.600,00	20.888,00	36.712,00	63,74
158	Warulor	Sukobendu	Mantup	1,00	10,00	Air Baku	18.000,00	4.565,00	13.435,00	74,64
159	Gagar	Sukobendu	Mantup	3,10	25,00	Irigasi	55.800,00	17.018,45	38.781,55	69,50
160	Sukosari	Sukosari	Mantup	2,40	15,00	Irigasi	43.200,00	4.320,00	38.880,00	90,00
161	Kepohsari	Sukosari	Mantup	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	2.700,00	15.300,00	85,00
162	Sumberagung III	Sumberagung	Mantup	1,50	25,00	Irigasi dan Air Baku	27.000,00	6.480,00	20.520,00	76,00
163	Banjarselir	Sumberagung	Mantup	1,60	0,00	Air Baku	28.800,00	6.864,00	21.936,00	76,17
164	Sumberagung I	Sumberagung	Mantup	2,00	58,00	Irigasi	36.000,00	11.880,00	24.120,00	67,00
165	Sumberagung II	Sumberagung	Mantup	2,00	20,00	Irigasi	36.000,00	10.580,00	25.420,00	70,61
166	Suklan	Sumberbendo	Mantup	1,50	35,00	Irigasi dan Air Baku	27.000,00	15.120,00	11.880,00	44,00
167	Sumberdadi	Sumberdadi	Mantup	3,00	20,00	Irigasi	54.000,00	15.120,00	38.880,00	72,00
168	Sumbergurip	Sumberdadi	Mantup	1,10	35,00	Irigasi	19.800,00	8.316,00	11.484,00	58,00
169	Balong	Sumberdadi	Mantup	1,00	10,00	Irigasi	18.000,00	3.420,00	14.580,00	81,00
170	Kedungsumber	Sumberdadi	Mantup	0,50	10,00	Irigasi	9.000,00	2.160,00	6.840,00	76,00
171	Ayamalas	Sumberkerep	Mantup	1,50	0,00	Air Baku	27.000,00	8.910,00	18.090,00	67,00
172	Sukowati	Sumberkerep	Mantup	2,00	40,00	Irigasi	36.000,00	26.640,00	9.360,00	26,00
173	Tugu	Tugu	Mantup	3,30	43,00	Irigasi	59.400,00	16.632,00	42.768,00	72,00
174	Tunggun	Tunggunjagir	Mantup	3,10	83,00	Irigasi	55.800,00	10.581,45	45.218,55	81,04
175	Karangan	Tunggunjagir	Mantup	2,00	83,00	Irigasi	36.000,00	12.517,45	23.482,55	65,23
176	Sumberbendo	Tunggunjagir	Mantup	0,50	10,00	Irigasi	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
177	Rungkut	Tunggunjagir	Mantup	0,75	0,00	Air Baku	13.500,00	4.455,00	9.045,00	67,00
178	Kedungwaras	Kedungwaras	Modo	0,80	10,00	Irigasi	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00
179	Duri	Durikedungjero	Ngimbang	1,50	15,00	Irigasi dan Air Baku	27.000,00	2.700,00	24.300,00	90,00
180	Pasinan	Durikedungjero	Ngimbang	1,00	10,00	Irigasi	18.000,00	2.900,00	15.100,00	83,89
181	Gurit	Drugujurit	Ngimbang	1,00	10,00	Irigasi	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
182	Cerme	Girik	Ngimbang	1,00	10,00	Irigasi	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
183	Kambangan	Lamongrejo	Ngimbang	1,40	25,00	Irigasi dan Air Baku	25.200,00	6.048,00	19.152,00	76,00
184	Pelas	Lamongrejo	Ngimbang	4,75	40,00	Irigasi dan Air Baku	85.500,00	23.940,00	61.560,00	72,00
185	Juwet Duren	Lawak	Ngimbang	0,95	34,00	Irigasi dan Air Baku	17.100,00	1.710,00	15.390,00	90,00
186	Teguhan	Mendogo	Ngimbang	1,00	20,00	Irigasi dan Air Baku	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
187	Mawut I	Mendogo	Ngimbang	3,20	70,00	Irigasi dan Air Baku	57.600,00	20.688,00	36.912,00	64,08
188	Mawut II	Mendogo	Ngimbang	2,00	15,00	Irigasi	36.000,00	16.920,00	19.080,00	53,00

No	Nama Embung Desa	Lokasi		Luasan Waduk (ha)	Baku sawah (ha)	Fungsi	Kapasitas Efektif Embung (m³)	Volume Sedimentasi (m³)	Kapasitas Embung Saat ini	
		Desa/Kelurahan	Kec.						(m3)	%
189	Munungrejo	Munungrejo	Ngimbang	1,50	20,00	Irigasi dan Air Baku	27.000,00	6.535,00	20.465,00	75,80
190	Munungkidul	Munungrejo	Ngimbang	3,00	20,00	Irigasi	54.000,00	20.520,00	33.480,00	62,00
191	Mununglor	Munungrejo	Ngimbang	2,40	45,00	Irigasi dan Air Baku	43.200,00	8.096,00	35.104,00	81,26
192	Tlg Ngasem	Ngasem L. bang	Ngimbang	0,60	0,00	Air Baku	10.800,00	1.080,00	9.720,00	90,00
193	Ngimbang	Ngimbang	Ngimbang	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	5.940,00	12.060,00	67,00
194	Tiemang	Tiemang	Ngimbang	0,40	0,00	Air Baku	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
195	Sumurgayam	Sumurgayam	Paciran	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	4.320,00	13.680,00	76,00
196	Sumuran	Sumurgayam	Paciran	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	8.460,00	9.540,00	53,00
197	Tunggul	Tunggul	Paciran	0,40	0,00	Air Baku	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
198	Rumbuk Nongko	Kranji	Paciran	3,00	35,00	Irigasi	54.000,00	23.540,00	30.460,00	56,41
199	Badu	Gempolpading	Pucuk	2,50	50,00	Irigasi	45.000,00	14.850,00	30.150,00	67,00
200	Kedali	Kedali	Pucuk	3,00	65,00	Irigasi	54.000,00	22.680,00	31.320,00	58,00
201	Banaran	Sumberjo	Pucuk	2,50	25,00	Irigasi	45.000,00	22.950,00	22.050,00	49,00
202	Patalan	Sumberjo	Pucuk	18,00	135,00	Irigasi	324.000,00	165.240,00	158.760,00	49,00
203	Tanggungan	Tanggungan	Pucuk	8,00	102,00	Irigasi	144.000,00	58.380,00	85.620,00	59,46
204	Ngambeg	Ngambeg	Pucuk	0,60	0,00	Irigasi	10.800,00	4.536,00	6.264,00	58,00
205	Wanar	Wanar	Pucuk	4,00	35,00	Irigasi	72.000,00	23.600,00	48.400,00	67,22
206	Tulung	Wanar	Pucuk	15,00	141,00	Irigasi	270.000,00	137.700,00	132.300,00	49,00
207	Barurejo	Barurejo	Sambeng	1,05	26,00	Irigasi	18.900,00	4.237,00	14.663,00	77,58
208	Gempolmanis	Gempolmanis	Sambeng	1,20	20,00	Irigasi	21.600,00	9.072,00	12.528,00	58,00
209	Kedungwangi	Kedungwangi	Sambeng	1,20	35,00	Irigasi	21.600,00	15.735,00	5.865,00	27,15
210	Kreteranggon	Kreteranggon	Sambeng	2,90	35,00	Irigasi	52.200,00	19.836,00	32.364,00	62,00
211	Kasah	Nogojatisari	Sambeng	0,20	10,00	Irigasi	3.600,00	225,00	3.375,00	93,75
212	Pedes	Selorejo	Sambeng	2,60	35,00	Irigasi	46.800,00	15.444,00	31.356,00	67,00
213	Selorejo	Selorejo	Sambeng	1,20	50,00	Irigasi	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00
214	Semampirejo	Semampirejo	Sambeng	5,40	55,00	Irigasi	97.200,00	27.216,00	69.984,00	72,00
215	Delik	Sidokumpul	Sambeng	1,10	30,00	Irigasi	19.800,00	6.534,00	13.266,00	67,00
216	Jatipandak	Jatipandak	Sambeng	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	5.940,00	12.060,00	67,00
217	Wates	Wateswinangun	Sambeng	1,50	30,00	Irigasi	27.000,00	10.260,00	16.740,00	62,00
218	Pojok	Wonorejo	Sambeng	0,60	0,00	Air Baku	10.800,00	2.052,00	8.748,00	81,00
219	Beru	Beru	Sarirejo	4,00	0,00	Air Baku	72.000,00	33.840,00	38.160,00	53,00
220	Canggih	Canggih	Sarirejo	0,85	0,00	Air Baku	15.300,00	1.530,00	13.770,00	90,00
221	Mahbang	Dermolemahbang	Sarirejo	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	4.740,00	13.260,00	73,67
222	Bendil	Dermolemahbang	Sarirejo	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	5.940,00	12.060,00	67,00
223	Serut	Dermolemahbang	Sarirejo	0,90	0,00	Air Baku	16.200,00	4.446,00	11.754,00	72,56
224	Karangaji	Dermolemahbang	Sarirejo	0,80	0,00	Air Baku	14.400,00	4.752,00	9.648,00	67,00
225	Jogo	Dermolemahbang	Sarirejo	1,00	15,00	Irigasi dan Air Baku	18.000,00	4.320,00	13.680,00	76,00
226	Dermo	Dermolemahbang	Sarirejo	3,20	30,00	Irigasi	57.600,00	19.008,00	38.592,00	67,00
227	Besuki	Dermolemahbang	Sarirejo	1,00	20,00	Irigasi	18.000,00	5.040,00	12.960,00	72,00
228	Gempol	Gempoltukmloko	Sarirejo	5,00	0,00	Air Baku	90.000,00	34.200,00	55.800,00	62,00
229	Dampit	Gempoltukmloko	Sarirejo	4,20	0,00	Air Baku	75.600,00	23.929,45	51.670,55	68,35
230	Gempolpayung	Gempoltukmloko	Sarirejo	4,00	0,00	Air Baku	72.000,00	27.360,00	44.640,00	62,00
231	Gempoltukmloko	Gempoltukmloko	Sarirejo	30,00	0,00	Air Baku	540.000,00	252.900,00	287.100,00	53,17
232	Kepuh	Kedungkumpul	Sarirejo	1,50	0,00	Air Baku	27.000,00	8.910,00	18.090,00	67,00
233	Walangkopo	Kedungkumpul	Sarirejo	0,60	0,00	Air Baku	10.800,00	1.080,00	9.720,00	90,00
234	Kedungkumpul	Kedungkumpul	Sarirejo	3,00	35,00	Irigasi dan Air Baku	54.000,00	8.377,45	45.622,55	84,49
235	Kradenan	Sarirejo	Sarirejo	1,50	0,00	Air Baku	27.000,00	8.910,00	18.090,00	67,00
236	Sarirejo	Sarirejo	Sarirejo	4,00	0,00	Air Baku	72.000,00	23.760,00	48.240,00	67,00
237	Gendot	Sarirejo	Sarirejo	0,90	0,00	Air Baku	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
238	Simbatan	Simbatan	Sarirejo	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
239	Badu	Sumberjo	Sarirejo	2,00	0,00	Air Baku	36.000,00	12.480,00	23.520,00	65,33
240	Grigis	Sumberjo	Sarirejo	3,00	0,00	Air Baku	54.000,00	5.400,00	48.600,00	90,00
241	Sepat	Tambakmenjangan	Sarirejo	1,90	0,00	Air Baku	34.200,00	6.498,00	27.702,00	81,00
242	Timbuan	Tambakmenjangan	Sarirejo	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	4.320,00	13.680,00	76,00
243	Tulung	Tambakmenjangan	Sarirejo	1,90	35,00	Irigasi	34.200,00	9.576,00	24.624,00	72,00
244	Bajangan	Tambakmenjangan	Sarirejo	5,00	65,00	Irigasi	90.000,00	28.500,00	61.500,00	68,33
245	Bulutengger	Bulutengger	Sekaran	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	2.264,15	6.735,85	74,84
246	Sekaran	Sekaran	Sekaran	0,35	0,00	Air Baku	6.300,00	915,00	5.385,00	85,48
247	Banyubang 1	Banyubang	Solokuro	1,50	0,00	Air Baku	27.000,00	11.340,00	15.660,00	58,00
248	Banyubang 2	Banyubang	Solokuro	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	3.780,00	5.220,00	58,00
249	Bluri	Bluri	Solokuro	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
250	Dadapan	Dadapan	Solokuro	1,00	0,00	Irigasi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
251	Dagan	Dagan	Solokuro	2,20	25,00	Irigasi	39.600,00	13.068,00	26.532,00	67,00
252	Payaman	Payaman	Solokuro	1,50	45,00	Irigasi	27.000,00	4.350,00	22.650,00	83,89

No	Nama Embung Desa	Lokasi		Luasan Waduk (ha)	Baku sawah (ha)	Fungsi	Kapasitas Efektif Embung (m³)	Volume Sedimentasi (m³)	Kapasitas Embung Saat ini	
		Desa/Kelurahan	Kec.						(m3)	%
253	Sekar	Payaman	Solokuro	1,00	10,00	Irigasi	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
254	Sekar	Payaman	Solokuro	1,00	0,00	Irigasi	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
255	Telogoposo	Payaman	Solokuro	1,00	10,00	Air Baku	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
256	Solokuro	Solokuro	Solokuro	1,00	25,00	Irigasi	18.000,00	1.920,00	16.080,00	89,33
257	Jajong	Solokuro	Solokuro	10,00	50,00	Irigasi	180.000,00	32.178,72	147.821,28	82,12
258	Tlg. Sugihan	Sugihan	Solokuro	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
259	Sregenjeng	Sugihan	Solokuro	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
260	Takerharjo / Petiyen	Takerharjo	Solokuro	1,00	20,00	Irigasi	18.000,00	900,00	17.100,00	95,00
261	Tebluru	Tebluru	Solokuro	1,50	20,00	Irigasi	27.000,00	10.640,00	16.360,00	60,59
262	Kuwati	Tebluru	Solokuro	1,00	10,00	Irigasi	18.000,00	3.960,00	14.040,00	78,00
263	Ngulaan	Tebluru	Solokuro	2,50	20,00	Irigasi	45.000,00	6.257,45	38.742,55	86,09
264	Kuwati II	Tebluru	Solokuro	4,00	25,00	Irigasi	72.000,00	19.717,45	52.282,55	72,61
265	Plungan	Tebluru	Solokuro	0,20	5,00	Irigasi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
266	Semendek	Tebluru	Solokuro	0,40	10,00	Irigasi	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
267	Tenggulun	Tenggulun	Solokuro	2,00	161,00	Irigasi	36.000,00	9.360,00	26.640,00	74,00
268	Sentono	Tenggulun	Solokuro	2,00	30,00	Irigasi	36.000,00	6.397,45	29.602,55	82,23
269	Singgang	Bakalrejo	Sugio	7,00	50,00	Irigasi	126.000,00	24.690,00	101.310,00	80,40
270	Puripan	Bedingin	Sugio	1,50	25,00	Air Baku	27.000,00	1.350,00	25.650,00	95,00
271	Medali	Daliwangun	Sugio	1,00	10,00	Irigasi	18.000,00	4.320,00	13.680,00	76,00
272	Gadung	Deketagung	Sugio	1,50	12,00	Irigasi	27.000,00	7.560,00	19.440,00	72,00
273	Deket	Deketagung	Sugio	2,20	50,00	Irigasi	39.600,00	6.504,00	33.096,00	83,58
274	Randubolong	Gondanglor	Sugio	0,85	0,00	Air Baku	15.300,00	4.284,00	11.016,00	72,00
275	Gondanglor	Gondanglor	Sugio	4,50	0,00	Air Baku	81.000,00	8.100,00	72.900,00	90,00
276	Biting	Gondanglor	Sugio	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	6.840,00	11.160,00	62,00
277	Embunggondang	Gondanglor	Sugio	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
278	Jubel Kidul	Jubel Kidul	Sugio	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
279	Kedungjati	Jubel Kidul	Sugio	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
280	Jatirejo	Jubel Kidul	Sugio	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
281	Jubellor	Jubellor	Sugio	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
282	Suci	Jubellor	Sugio	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	2.520,00	6.480,00	72,00
283	Kedungbanjar II	Kedungbanjar	Sugio	0,18	0,00	Air Baku	3.240,00	162,00	3.078,00	95,00
284	Sambiroto	Karangsambigalih	Sugio	2,00	15,00	Irigasi	36.000,00	11.880,00	24.120,00	67,00
285	Bandung	Karangsambigalih	Sugio	2,00	15,00	Irigasi	36.000,00	15.920,00	20.080,00	55,78
286	Kedungbanjar	Kedungbanjar	Sugio	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	1.710,00	7.290,00	81,00
287	Rambit	Kedungbanjar	Sugio	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	2.160,00	6.840,00	76,00
288	Bawang	Lawanganagung	Sugio	1,00	40,00	Irigasi	18.000,00	5.940,00	12.060,00	67,00
289	Embungawah	Lawanganagung	Sugio	1,00	40,00	Irigasi	18.000,00	9.180,00	8.820,00	49,00
290	Lawangan	Lawanganagung	Sugio	2,70	25,00	Irigasi	48.600,00	26.316,00	22.284,00	45,85
291	Sidowayah	Lawanganagung	Sugio	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
292	Lebak	Lebakadi	Sugio	3,00	0,00	Air Baku	54.000,00	17.820,00	36.180,00	67,00
293	Karanggeneng	Lebakadi	Sugio	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
294	Menteseh	Lebakadi	Sugio	2,50	0,00	Air Baku	45.000,00	11.407,45	33.592,55	74,65
295	Dagelan	Pangkatrejo	Sugio	2,00	65,00	Irigasi	36.000,00	8.640,00	27.360,00	76,00
296	Tlg Dagelan	Pangkatrejo	Sugio	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
297	Tanggal	Pangkatrejo	Sugio	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	1.710,00	7.290,00	81,00
298	Slempit	Pangkatrejo	Sugio	1,00	40,00	Irigasi	18.000,00	4.320,00	13.680,00	76,00
299	Supenuh	Supenuh	Sugio	0,85	20,00	Irigasi	15.300,00	600,00	14.700,00	96,08
300	Mambung	Supenuh	Sugio	0,85	10,00	Irigasi	15.300,00	5.814,00	9.486,00	62,00
301	Gampang	Sekarbagus	Sugio	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	1.350,00	7.650,00	85,00
302	Guyangan	Sekarbagus	Sugio	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
303	Bagusan	Sekarbagus	Sugio	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
304	Sumuran	Sekarbagus	Sugio	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
305	Sekaran	Sekarbagus	Sugio	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
306	Wonosari	Sekarbagus	Sugio	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
307	German	German	Sugio	0,30	0,00	Air Baku	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
308	Tawon	Balungtawon	Sukodadi	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
309	Bangunrejo	Balungtawon	Sukodadi	0,40	0,00	Air Baku	7.200,00	3.024,00	4.176,00	58,00
310	Menaor	Banjarjo	Sukodadi	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
311	Mireng	Banjarjo	Sukodadi	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
312	Balan	Banjarjo	Sukodadi	0,80	0,00	Air Baku	14.400,00	1.440,00	12.960,00	90,00
313	Baturono	Baturono	Sukodadi	1,20	0,00	Air Baku	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00
314	Madulegi	Madulegi	Sukodadi	0,60	0,00	Air Baku	10.800,00	1.080,00	9.720,00	90,00
315	Plumpang	Plumpang	Sukodadi	0,70	0,00	Air Baku	12.600,00	1.260,00	11.340,00	90,00
316	Banguran	Sugihrejo	Sukodadi	0,60	0,00	Air Baku	10.800,00	450,00	10.350,00	95,83

No	Nama Embung Desa	Lokasi		Luasan Waduk (ha)	Baku sawah (ha)	Fungsi	Kapasitas Efektif Embung (m ³)	Volume Sedimentasi (m ³)	Kapasitas Embung Saat ini	
		Desa/Kelurahan	Kec.						(m3)	%
317	Tanon	Sugihrejo	Sukodadi	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
318	Gilig	Sugihrejo	Sukodadi	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
319	Sukodadi	Sukodadi	Sukodadi	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
320	Sumlaran	Sukodadi	Sukodadi	0,10	0,00	Air Baku	1.800,00	89,50	1.710,50	95,03
321	Tlogorejo	Tlogorejo	Sukodadi	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
322	Gempol	Gedangan	Sukodadi	0,70	0,00	Air Baku	12.600,00	1.260,00	11.340,00	90,00
323	Sukolilo	Sukolilo	Sukodadi	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	3.530,00	5.470,00	60,78
324	Mragel	Mragel	Sukorame	2,00	0,00	Irigasi	36.000,00	3.600,00	32.400,00	90,00
325	Sukorame	Sukorame	Sukorame	2,00	0,00	Air Baku	36.000,00	6.490,00	29.510,00	81,97
326	Kedungkumpul	Kedungkumpul	Sukorame	1,50	20,00	Irigasi	27.000,00	5.538,72	21.461,28	79,49
327	Sewor	Sewor	Sukorame	3,10	0,00	Air Baku	55.800,00	7.991,45	47.808,55	85,68
328	Sembung	Sembung	Sukorame	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	5.940,00	12.060,00	67,00
329	Pendowokumpul	Pendowokumpul	Sukorame	2,00	20,00	Irigasi	36.000,00	16.920,00	19.080,00	53,00
330	Bakalan	Bakalanpule	Tikung	0,70	0,00	Air Baku	12.600,00	1.260,00	11.340,00	90,00
331	Pule	Bakalanpule	Tikung	4,50	60,00	Irigasi	81.000,00	34.020,00	46.980,00	58,00
332	Sekargeneng	Bakalanpule	Tikung	0,70	0,00	Air Baku	12.600,00	1.260,00	11.340,00	90,00
333	Balongsangi	Balongsangi	Tikung	3,10	30,00	Irigasi dan Air Baku	55.800,00	13.392,00	42.408,00	76,00
334	Geger	Balongsangi	Tikung	1,50	14,00	Irigasi	27.000,00	8.910,00	18.090,00	67,00
335	Banjaran	Balongsangi	Tikung	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	1.520,00	7.480,00	83,11
336	Leboyo	Balongsangi	Tikung	1,45	15,00	Irigasi	26.100,00	4.959,00	21.141,00	81,00
337	Pilanganom	Balongsangi	Tikung	1,40	20,00	Irigasi	25.200,00	9.576,00	15.624,00	62,00
338	Botoputih	Botoputih	Tikung	1,00	40,00	Irigasi	18.000,00	7.560,00	10.440,00	58,00
339	Tlanak	Botoputih	Tikung	2,50	15,00	Irigasi	45.000,00	15.857,45	29.142,55	64,76
340	Mojogandik	Botoputih	Tikung	1,55	40,00	Irigasi	27.900,00	2.790,00	25.110,00	90,00
341	Made	Botoputih	Tikung	1,00	10,00	Irigasi	18.000,00	3.420,00	14.580,00	81,00
342	Dukuh	Dukuhagung	Tikung	2,00	20,00	Irigasi dan Air Baku	36.000,00	4.640,00	31.360,00	87,11
343	Mojoranu	Dukuhagung	Tikung	1,00	20,00	Air Baku	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
344	Lenjer	Dukuhagung	Tikung	0,60	0,00	Air Baku	10.800,00	1.080,00	9.720,00	90,00
345	Tinaro	Dukuhagung	Tikung	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
346	Kacangan	Dukuhagung	Tikung	1,00	10,00	Irigasi dan Air Baku	18.000,00	4.320,00	13.680,00	76,00
347	Bajangan	Guminingrejo	Tikung	1,00	10,00	Air Baku	18.000,00	3.420,00	14.580,00	81,00
348	Gumining	Guminingrejo	Tikung	1,00	10,00	Air Baku	18.000,00	5.040,00	12.960,00	72,00
349	Topeng	Jatirejo	Tikung	2,00	0,00	Air Baku	36.000,00	3.600,00	32.400,00	90,00
350	Jatirejo	Jatirejo	Tikung	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
351	Karangpilang	Jatirejo	Tikung	4,00	45,00	Irigasi dan Air Baku	72.000,00	26.197,45	45.802,55	63,61
352	Tambakjurit	Jatirejo	Tikung	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	4.230,00	4.770,00	53,00
353	Kemendjung	Jatirejo	Tikung	0,50	0,00	Air Baku	9.000,00	3.780,00	5.220,00	58,00
354	Sanur	Jotosanur	Tikung	0,56	10,00	Irigasi	10.080,00	2.419,20	7.660,80	76,00
355	Jotosanur	Jotosanur	Tikung	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	5.940,00	12.060,00	67,00
356	Kalianyar	Kelorarum	Tikung	2,00	10,00	Irigasi	36.000,00	7.037,45	28.962,55	80,45
357	Kelor	Kelorarum	Tikung	2,10	15,00	Irigasi	37.800,00	15.876,00	21.924,00	58,00
358	Semanding	Pengumbulanadi	Tikung	0,50	10,00	Irigasi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
359	Pengaron	Pengumbulanadi	Tikung	1,20	12,00	Irigasi dan Air Baku	21.600,00	2.160,00	19.440,00	90,00
360	Telogo Delik	Pengumbulanadi	Tikung	1,20	12,00	Air Baku	21.600,00	2.160,00	19.440,00	90,00
361	Mumbulan	Pengumbulanadi	Tikung	2,00	50,00	Irigasi	36.000,00	13.920,00	22.080,00	61,33
362	Randekan	Soko	Tikung	2,80	40,00	Irigasi dan Air Baku	50.400,00	16.225,45	34.174,55	67,81
363	Banyuwet	Soko	Tikung	0,80	0,00	Air Baku	14.400,00	1.440,00	12.960,00	90,00
364	Kalisogo	Soko	Tikung	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
365	Kebondalem	Soko	Tikung	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
366	Soko	Soko	Tikung	2,90	0,00	Irigasi dan Air Baku	52.200,00	5.220,00	46.980,00	90,00
367	Banjaran	Soko	Tikung	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	5.940,00	12.060,00	67,00
368	Sememi	Soko	Tikung	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
369	Klating	Takeranklating	Tikung	1,10	10,00	Air Baku	19.800,00	990,00	18.810,00	95,00
370	Takeran	Takeranklating	Tikung	1,20	15,00	Irigasi	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00
371	Genceng	Takeranklating	Tikung	1,00	0,00	Irigasi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
372	Mojolegi	Takeranklating	Tikung	0,50	0,00	Irigasi	9.000,00	900,00	8.100,00	90,00
373	Tambakboyo	Tambakrigadung	Tikung	1,50	0,00	Air Baku	27.000,00	2.700,00	24.300,00	90,00
374	Pilanggadung	Tambakrigadung	Tikung	3,95	75,00	Irigasi dan Air Baku	71.100,00	29.862,00	41.238,00	58,00
375	Tuwiri	Tambakrigadung	Tikung	1,50	0,00	Air Baku	27.000,00	2.700,00	24.300,00	90,00
376	Tambakrigadung	Tambakrigadung	Tikung	1,50	0,00	Air Baku	27.000,00	7.560,00	19.440,00	72,00
377	Mojokerep	Wonokromo	Tikung	1,50	10,00	Irigasi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
378	Mojogede	Wonokromo	Tikung	2,00	5,00	Irigasi	36.000,00	13.680,00	22.320,00	62,00
379	Kanoman	Wonokromo	Tikung	0,80	0,00	Air Baku	14.400,00	0,00	14.400,00	100,00
380	Wonorejo	Wonokromo	Tikung	0,40	0,00	Air Baku	7.200,00	720,00	6.480,00	90,00

No	Nama Embung Desa	Lokasi		Luasan Waduk (ha)	Baku sawah (ha)	Fungsi	Kapasitas Efektif Embung (m³)	Volume Sedimentasi (m³)	Kapasitas Embung Saat ini	
		Desa/Kelurahan	Kec.						(m3)	%
381	Jatilangkir 1	Wonokromo	Tikung	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
382	Jatilangkir 2	Wonokromo	Tikung	1,10	0,00	Air Baku	19.800,00	8.316,00	11.484,00	58,00
383	Gabus	Wonokromo	Tikung	1,50	0,00	Air Baku	27.000,00	2.700,00	24.300,00	90,00
384	Tlogogede	Wonokromo	Tikung	0,70	0,00	Air Baku	12.600,00	1.260,00	11.340,00	90,00
385	Pilanggot	Wonokromo	Tikung	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	1.800,00	16.200,00	90,00
386	Langkir	Wonokromo	Tikung	0,70	10,00	Air Baku	12.600,00	1.260,00	11.340,00	90,00
387	Klari	Gedongboyountung	Turi	0,70	0,00	Air Baku	12.600,00	1.260,00	11.340,00	90,00
388	Wangun	Wangunrejo	Turi	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	5.400,00	12.600,00	70,00
389	Tamanprijek	Tamanprijek	Laren	1,00	0,00	Air Baku	18.000,00	9.374,89	8.625,11	47,92
	JUMLAH				6.871,00		12.344.220,00	3.883.748,28	8.460.471,72	68,54